



**PERANAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA DALAM
PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN 1945-1949**

SKRIPSI

Oleh
Sungkar Pratama
NIM 120210302053

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PERANAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA DALAM
PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN 1945-1949**

SKRIPSI

diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Program Studi
Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP
Universitas Jember

Oleh
Sungkar Pratama
NIM 120210302053

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Sutiasih dan Bapak Tukidjo, serta adikku Tita Novianti dan Teti Novianti, yang telah memberikan kasih sayang tulus dan doa di setiap langkahku, memberikan bimbingan, perlindungan dan semangat dalam menjalani hidup demi keberhasilanku;
2. Pendidikku; Guru-guru sejak taman Kanak-Kanak serta Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Jember yang telah tulus dan sabar dalam membekali ilmu pengetahuan;
3. Almamater tercinta Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang kubanggakan.

MOTTO

“Menghentikan perjuangan berarti penghianatan terhadap cita-cita
semula dan terhadap korban-korban yang telah jatuh mati
atau cacat di Medan Perjuangan”
(Sjafruddin Prawiranegara)*



*) https://jagokata.com/kata-bijak/dari-syafruddin_prawiranegara.html

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sungkar Pratama

NIM : 120210302053

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2019

Yang menyatakan,

Sungkar Pratama.

NIM. 120210302053

SKRIPSI

**PERANAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA DALAM
PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN 1945-1949**

Oleh:

Sungkar Pratama
NIM. 120210302053

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Sumarjono, M. Si.

Dosen Pembimbing II : Drs. Sugiyanto, M. Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia tahun 1945-1949” ini telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Rabu, 26 Juni 2019

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sumarjono, M. Si.
NIP. 19580823 198702 1 001

Drs. Sugiyanto, M. Hum.
NIP. 19570220 198503 1 003

Anggota I,

Anggota II

Drs. Kayan Swastiika, M. Si.
NIP. 19670210 200212 1 002

Drs. Sumarno, M. Pd.
NIP. 19522104 198403 1 002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D
NIP. 19680802 1993031 004

RINGKASAN

Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949, Sungkar Pratama, 120210302053; 2019, xi + 80; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Sjafruddin Prawiranegara adalah salah satu tokoh yang memiliki peranan besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Sederet jabatan telah diembannya seperti Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran dan Wakil Perdana Menteri. Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa sosok Mr Sjafruddin merupakan teladan dan telah memberikan sumbangsihnya bagi bangsa dan negara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai BP KNIP tahun 1945?; (2) bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan tahun 1946-1947?; (3) bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri kemakmuran tahun 1948-1949?. Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Untuk menganalisis secara logis mengenai peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai BP KNIP tahun 1945; (2) Untuk menganalisis peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan tahun 1946-1947; (3) untuk menganalisis peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri kemakmuran tahun 1948-1949.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Yaitu Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi politik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peran atau *role teory* yang dikemukakan oleh Livinson

Hasil penelitian ini adalah peran penting Sjafruddin Prawiranegara dalam membantu perjuangan dalam mempertahankan dan menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja merdeka dan kembali harus mempertahankan dari agresi militer belanda I dan II yang cukup banyak memeras keringat dan perjuangan bangsa Indonesia untuk kembali pulih dari berbagai macam tekanan dari luar negeri. Peranan Sjafruddin Prawiranegara ditunaikan

dalam bentuk pengabdian dalam BP KNIP pada tahun 1945, selanjutnya adalah pengabdian total menjadi Menteri Keuangan yang harus menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis moneter dan terpaan inflasi luar biasa. Terakhir peranan Sjafruddin Prawiranegara adalah sebagai menteri kemakmuran dalam kabinet Hatta.

Kesimpulan dari penelitian ini Peran serta Sjafruddin bagi Indonesia tahun 1945-1949 yaitu diawali dengan dipilihnya Sjafruddin menjadi salah satu anggota Badan Pekerja KNIP pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945. Peran penting Sjafruddin selanjutnya yaitu menjadi Menteri Keuangan Kabinet Sjahrir III dengan kebijakan mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI). Peristiwa dikeluarkannya ORI merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan ekonomi Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan dan sedang membebaskan diri dari kolonialisme ekonomi, sebagai alat perjuangan kemerdekaan dalam membiayai berbagai macam keperluan negara. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran memperbaiki ekonomi Indonesia. Sjafruddin ditunjuk untuk membentuk PDRI pada tahun 1948 guna menyelamatkan Republik dengan menjamin kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, memenuhi tuntutan hukum internasional, dan untuk melanjutkan Perjuangan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala rahmat, dan karunia-nya sehingga penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul “Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949”.

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D, selaku Rektor Universitas Jember
2. Prof. Dr. Dafik, M.Sc. Ph. D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M. Hum, selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember;
5. Drs. Sumarjono, M. Si., selaku sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Sugiyanto, M. Hum., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
7. Drs. Kayan Swastika, M. Si., selaku dosen penguji utama yang telah banyak memberikan masukan dalam skripsi ini;
8. Drs. Sumarno, M. Pd., selaku dosen penguji anggota yang telah banyak memberikan masukan dalam skripsi ini;
9. Semua Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, yang bersedia berbagi ilmu dan pengalaman;

10. Orang tua tercinta, Ibu Sutiasih dan Bapak Tukidjo. Serta Adik kembarku Tita Novianti dan Teti Novianti yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, semangat, motivasi, dan nasehat yang selalu mengiringi setiap langkah penulis;
11. Sahabat-sahabat terbaikku Jaya, Agus, Alex, Rama dan Quraisyi, serta Teman-teman di Kos Brantas VII No 30, sahabat Ajib, Andika, Fandy, Rendy, dan Zein yang telah meluangkan banyak waktu dan kesempatannya untuk membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini;
12. Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2012; dan,
13. Semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

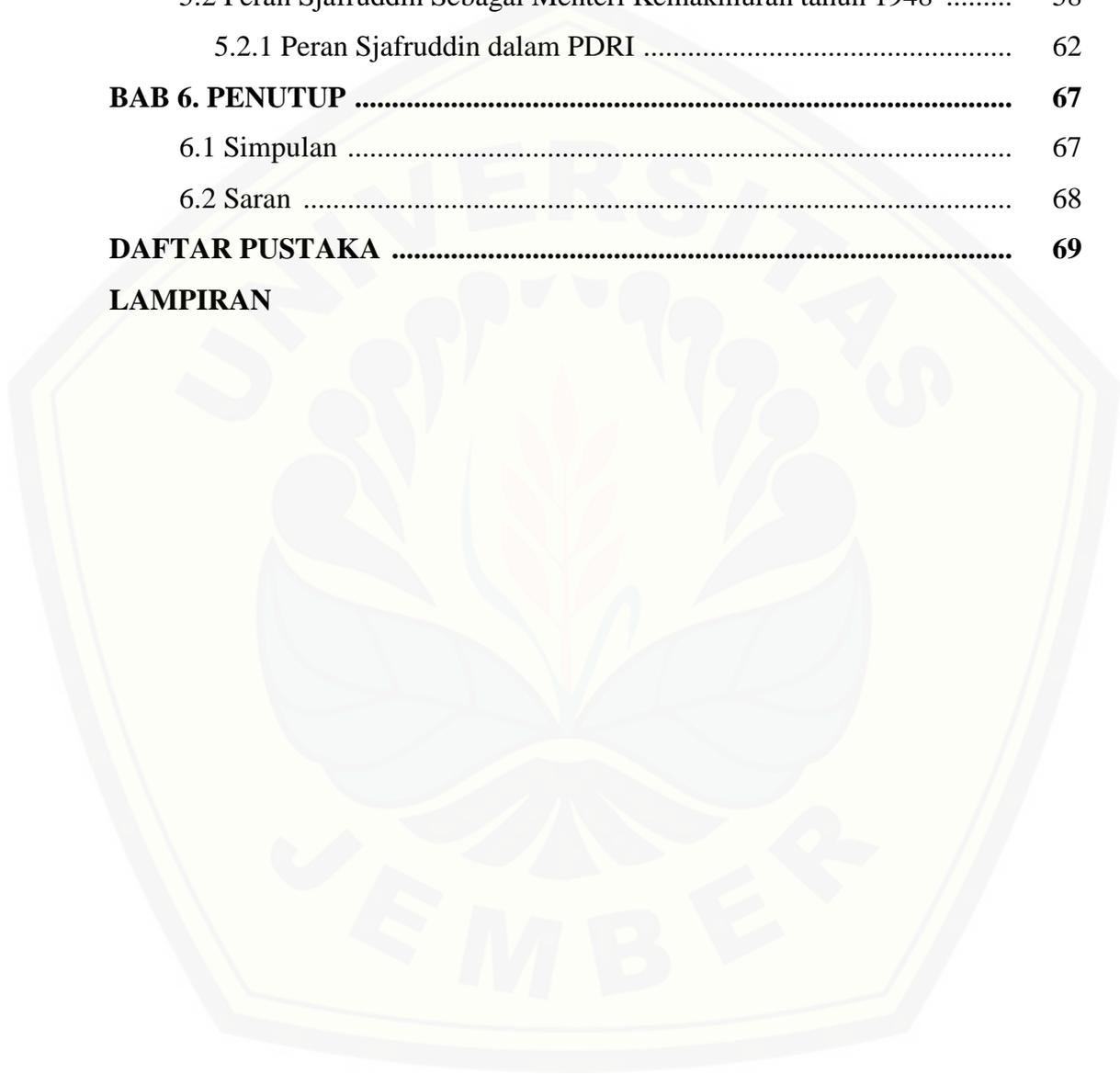
Jember, 12 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	4
1.3 Ruang Lingkup Penulisan	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB 3. METODE PENELITIAN	12
BAB 4. LATAR BELAKANG SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI ANGGOTA BP KNIP TAHUN 1945	17
4.1 Latar Belakang Pendidikan, dan Sosial Politik	17
4.1.1 Latar Belakang Pendidikan	17
4.1.2 Latar Belakang Kehidupan Sosial-Politik	21
4.1.3 Biografi Sjafruddin Prawiranegara	28
4.2 Peran Sjafruddin Sebagai Anggota BP KNIP Tahun 1945	33
BAB 5. PERAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI MENTERI KEUNAGAN DAN KEMAKMURAN	

TAHUN 1946-1949	38
5.1 Peran Sjafruddin Sebagai Menteri Keuangan Tahun 1946	42
5.1.1 Peran Sjafruddin Sebagai Menteri Keuangan Kedua 1949	48
5.1.2 Peran Sjafruddin Sebagai Gubernur Bank	54
5.2 Peran Sjafruddin Sebagai Menteri Kemakmuran tahun 1948	58
5.2.1 Peran Sjafruddin dalam PDRI	62
BAB 6. PENUTUP	67
6.1 Simpulan	67
6.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sjafruddin Prawiranegara adalah salah satu tokoh yang memiliki peranan besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Sederet jabatan telah diembannya seperti Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran dan Wakil Perdana Menteri. Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa sosok Mr Sjafruddin merupakan teladan dan telah memberikan sumbangsuhnya bagi bangsa dan negara (Hakiem dan Noer, 2011: ix).

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia mulai tampak. Sjafruddin Prawiranegara diangkat menjadi anggota Badan Pekerja KNIP, yang bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Tanggal 2 Oktober 1946 Sjafruddin diangkat menjadi Menteri Keuangan. Sjafruddin menjadi Menteri Keuangan pada kabinet Sjahrir III (Maeswara, 2010: 114). Kesediaan Sjafruddin Prawiranegara menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir III karena ingin mewujudkan “Oeang Republik Indonesia” (ORI). Sjafruddin yakin ORI dapat menjadi alat untuk mencerminkan eksistensi negara Republik Indonesia. Selain itu juga dapat difungsikan untuk membiayai perjuangan seperti menggaji pegawai negeri, tentara, membeli perlengkapan administrasi pemerintah dan lain-lain. Keluarnya ORI merupakan tindakan perdana untuk mencapai peningkatan ekonomi (Rosidi, 2011: 127-137).

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan awal perjuangan kembali rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kedatangan Belanda yang diboncengi oleh NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) pada tanggal 29 September 1945 menegaskan kembali tentang perjuangan kemerdekaan yang belum selesai (Poesponegoro, 1993:122). Bangsa Indonesia yang menjadi koloni bangsa Belanda dalam beberapa abad sebelumnya memberikan nilai historis yang tidak ingin dilepaskan begitu saja. Melalui berbagai cara bangsa Belanda tetap

ingin mempertahankan hegemoni kekuasaan yang pernah diperoleh. Tujuan awal kedatangan kembali bangsa Belanda yang diboncengi NICA ialah mengemban tugas untuk melucuti tentara Jepang. Tetapi tujuan tersebut hanyalah sebagai salah satu bentuk guna mengelabui rakyat Indonesia. Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia menimbulkan pertentangan, bahkan hampir seluruh wilayah pulau Jawa terjadi pertempuran melawan NICA dan Sekutu. Kedatangan bangsa Belanda kembali ke Indonesia juga memunculkan sebuah kekuatan sosial politik yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia agar memperoleh pengakuan internasional melalui jalur diplomasi maupun perjuangan fisik. Banyak tokoh yang memiliki peranan penting dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satu tokoh politik yang namanya mulai dikenal masyarakat Indonesia pada saat negeri ini berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan adalah Sjafruddin Prawiranegara (Aning S, 2005: 183).

Puncak dari usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia adalah dengan melakukan Agresi Militer II. Pada tahun 1948 peranan dari Sjafrudin Prawiranegara menjadi sangat menonjol. Sjafruddin Prawiranegara mendapat mandat sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi (Moedjanto, 1988: 42). Pembentukan PDRI adalah akibat dari Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi Militer II dilancarkan oleh pihak Belanda sejak pukul 05.30 WIB. Serangan tersebut berhasil melumpuhkan Yogyakarta yang pada saat itu merupakan Ibu Kota Republik Indonesia Serikat (RIS), serta berhasil menangkap Soekarno dan Mohammad Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Tujuan Belanda melakukan Agresi Militer II adalah memperlihatkan ke dunia luar bahwa Republik Indonesia telah hancur lebur dengan didudukinya ibu kota Negara dan pemimpin negaranya telah ditawan. Untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan pemerintahan presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta segera mengirimkan dua buah surat kawat yang merupakan hasil dari sidang kabinet terakhir. Surat kawat yang pertama ditunjukkan kepada Sjafruddin Prawiranegara (menteri kemakmuran) yang waktu itu berada di Bukittinggi untuk

membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Surat kawat yang kedua diberikan kepada Dr. Sudarsno, A. N. Pallar dan Mr. Maramis di New Delhi (India) untuk membentuk Pemerintah Pelarian (*Government in Exile*), jika usaha Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera dalam membentuk PDRI tidak berhasil.

Embrio terbentuknya PDRI bermula dari pembicaraan Sjafrudin Prawiranegara dengan Mr. T.M. Hasan pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 18.00 sore di Bukittinggi. Di akhir perundingan, Mr. T.M. Hasan mengatakan “ketika itu juga kami tetapkan bahwa di Sumatera, yaitu Bukittinggi pada tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 sore (18.00 WIB) telah dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia”, dengan Ketua Sjafrudin Prawiranegara dan Wakil Ketua Mr. T.M. Hasan (Rasjid, 1984: 14-15). Mandat untuk membentuk pemerintah darurat republik Indonesia diberikan kepada Sjafruddin Prawiranegara karena Sjafruddin Prawiranegara sebelumnya memang telah dipersiapkan oleh Moh. Hatta menjadi perdana menteri sementara apabila terjadi serangan dari pasukan Belanda (Hatta, 2011:185). Berkat keberadaan PDRI dengan Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai ketua, bangsa Indonesia tetap berdiri hingga sekarang.

Hal yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini adalah upaya dari tokoh-tokoh pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satu tokoh bangsa Indonesia yang memiliki banyak peranan dalam pemerintahan Indonesia adalah Sjafruddin Prawiranegara. Penulis tertarik untuk mengkaji riwayat hidup dan kontribusi yang telah dilakukan oleh Sjafruddin Prawiranegara terhadap bangsa ini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini dirumuskan dengan judul “Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949”.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian. Oleh karena itu penulis menguraikan pengertian judul yaitu “Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949”.

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009: 212-213). Sedangkan menurut Reading (1986:360), peranan adalah bagian peran yang dimainkan seseorang atau serangkaian tingkah laku seseorang yang terdiri dari aspek dinamika status dan aspek proses status dengan kewajiban-kewajiban yang melekat pada suatu posisi.

Sjafruddin Prawiranegara merupakan tokoh bangsa, beliau lahir di Banten, Jawa Barat, 28 Februari 1911. Namanya mulai kenal oleh masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan, lebih tepatnya ketika bangsa Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan (Aning S, 2005:182-183).

Secara etimologis, definisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah); pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah (Pamudji, 1983:3).

Berdasarkan pengertian di atas, maka hakikat judul “Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949”, adalah segala usaha dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia setelah bangsa Indonesia merdeka hingga berakhirnya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1945-1949.

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Mengkaji suatu penelitian dibutuhkan suatu ruang lingkup untuk membatasi permasalahan supaya terfokus pada bahasan yang akan menjadi fokus permasalahan. Dalam penelitian sejarah, ada batasan untuk mengkaji suatu permasalahan yaitu batasan dari segi temporal (waktu), segi spasial (tempat), dan segi material (fokus kajian).

Segi temporal dalam penelitian ini adalah tahun 1945-1949. Tahun 1945 diambil sebagai dasar awal penelitian, karena pada tahun ini menjadi awal mula Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari dipilihnya Sjafruddin menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Selain itu tahun 1945 merupakan era baru bagi bangsa Indonesia setelah berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahun 1949 dijadikan sebagai batas akhir penelitian, karena pada tahun tersebut merupakan akhir dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Batasan spasial (tempat) dalam penelitian ini ditentukan di Indonesia. Karena penulis hanya akan mengkaji bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia kurun waktu 1945-1949. Segi material (fokus kajian) dari penulisan ini meliputi (1) peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai BP KNIP tahun 1945; (2) peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan tahun 1946-1947; (3) peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri kemakmuran tahun 1948-1949.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan ruang lingkup penulisan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai BP KNIP tahun 1945?
- 2) bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan tahun 1946-1947?
- 3) bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri kemakmuran tahun 1948-1949?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) untuk menganalisis peranan sjafruddin prawiranegara sebagai BP KNIP tahun 1945;
- 2) untuk menganalisis peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan tahun 1946-1947;
- 3) untuk menganalisis peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri kemakmuran tahun 1948-1949.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam proses penelitian ini.
- 2) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah pengetahuan dan penguasaan materi sejarah nasional yang berkaitan dengan peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1949.
- 3) bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan wawasan tentang peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam pergerakan nasional Indonesia dan dapat meneladani nilai-nilai perjuangan Sjafruddin Prawiranegara.
- 4) bagi FKIP Universitas Jember, dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan tinggi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengemukakan kajian tentang pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai “*Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1961*”. Kajian teori ini dilakukan dengan menemukan dan menganalisis pendapat–pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan peneliti sebelumnya, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan, misalnya berupa laporan penelitian, thesis, dan skripsi.

Sriyanto (2001) dalam tesis berjudul “Pemikiran Dakwah Mr. Sjafruddin Prawiranegara” menjelaskan bahwa Mr. Sjafruddin Prawiranegara merupakan tokoh yang unik dalam pemikiran dan dakwahnya. Dia dilahirkan di Anyar Kidul, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, pada tanggal 28 Februari 1911. Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa: sosok Mr Sjafruddin merupakan teladan dan telah memberikan sumbangsihnya bagi bangsa dan negara. "Beliau adalah putra terbaik bangsa dan memberikan sumbangsih bagi bangsa ini dan yang penting juga beliau adalah pribadi yang memberikan suri teladan dengan nilai luhur bagi pemimpin bangsa ini," kata Wapres saat memberi sambutan pada acara peringatan satu abad Mr. Sjafruddin. Pembelajaran unik lainnya dari seorang Sjafruddin adalah mengenai ketegasannya ketika menjadi ketua aktif Korps Mubaligh Indonesia.

Peran utama pemikiran dakwah Sjafruddin adalah keberaniannya dalam mengambil tindakan untuk mengambil alih menyelamatkan Indonesia dari kehancuran dan kekalahan Belanda, ketika terjadi agresi militernya dengan menangkap Soekarno Hatta. Dia melihat usahanya berinisiatif mendirikan PDRI sebagai cermin dari imannya kepada Allah, dan melihat usahanya dalam menegakkan PRRI guna menentang rejim Orde Lama yang sewenang-wenang juga sebagai lanjutan imannya. Peran pemikiran dakwah Sjafruddin juga sangat banyak dalam bidang ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari karier dan jabatannya. Berdasarkan jenjang karir dan jabatan yang pernah diembannya beliau selalu menjadi pemegang kebijakan penting dalam bidang ekonomi baik semasa

penjajahan maupun setelah merdeka. Wapres Boediono mengenang saat Mr Sjafruddin menjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta pada Maret 1950, melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas sehingga nilainya tinggal separuh. Dialah yang memperkenalkan uang Republik Indonesia pertama dengan sebutan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) sebagai identitas Negara yang berdaulat. Ketika RUU Bank Indonesia sedang dirumuskan dia memperjuangkan agar Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tetap merupakan lembaga independen tidak di bawah dominasi pemerintah. Gagasan besar Sjafruddin ini dijadikan landasan UU Bank Indonesia baru pada tahun 1999.

Budiawati (2014) dalam skripsi yang berjudul “Konsep Pembangunan Perekonomian Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Bung Hatta dan Sjafruddin Prawiranegara” menjelaskan bahwa Sjafruddin Prawiranegara pernah menjabat presiden selama 207 hari untuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) pada saat Soekarno dan Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan oleh pihak Belanda dalam Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Sjafruddin juga memiliki jabatan penting lainnya seperti Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, dan Gubernur Bank Indonesia (1950). Sjafruddin memiliki peran penting dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia.

Budiawati dalam skripsinya juga menjelaskan bahwa Mohammad Hatta (1902-1980) dan Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989) adalah salah satu dari banyak tokoh yang hidup pada zaman yang sama dan bekerjasama dalam membangun Indonesia. Keduanya memiliki andil yang sangat penting meskipun keduanya memiliki banyak perbedaan dalam pandangan dan pemikiran juga memiliki cara masing-masing dalam membangun perekonomian Indonesia, tapi tanpa keduanya Indonesia mungkin tidak akan bisa berdiri hingga sekarang

Skripsi Budiawati lebih fokus pada studi Komparasi antara pemikiran Moh. Hatta dengan pemikiran Sjafruddin Prawiranegara tentang konsep pembangunan perekonomian Indonesia secara umum. Sehingga penulis hanya mengambil salah satu aspek bahasan tentang pemikiran Sjafruddin Prawiranegara. Salah satu aspek bahasan tersebut sebagai penunjang untuk menganalisis

pemikiran Sjafruddin tentang pembangunan ekonomi yang akan dijabarkan dalam bab pembahasan

Permana (2013) dalam skripsi berjudul “Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI): Suatu Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948-1949” merupakan penelitian sejarah yang menggunakan teori Konflik. Pendekatan yang digunakan pendekatan politik yang menekankan konsep kekuasaan. Skripsi karya Permana menjelaskan mengenai pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pembentukan PDRI yang dilakukan akibat agresi militer Belanda II. Hal ini dilakukan untuk menghadapi agresi militer Belanda II yang ingin menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Sjafruddin Prawiranegara menerima mandat dari Soekarno dan Moh. Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat. Mandat tersebut hasil dari sidang kabinet pada 19 Desember yang dikirim kepada Sjafruddin melalui Telegram. Dimana Sjafruddin Prawiranegara pada waktu itu sedang berada di Bukittinggi. Telegram yang dikirim kepada Sjafruddin Prawiranegara sebenarnya tidak sampai di Bukittinggi karena Belanda telah menguasai jalur komunikasi. Namun, strategi pengalihan pemerintahan memang sudah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, walaupun tidak menerima mandat dari presiden, pada tanggal 22 Desember 1948 Sjafruddin Prawiranegara membentuk PDRI.

Skripsi Permana juga menjelaskan bahwa PDRI merupakan strategi perjuangan yang sentral dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini karena merupakan perpanjangan dari pemerintah Indonesia yang pada masa itu tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian tidak berarti menampikkan perjuangan yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada masa revolusi perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi di daerah-daerah, baik melalui jalan diplomasi ataupun bergerilya, karena dalam setiap tahapan sejarah memiliki peran dan arti penting tersendiri bagi masyarakat pendukungnya. Apabila dilihat dari strategi perjuangan, pembentukan PDRI memang mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam persatuan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

Skripsi yang berjudul “Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI): Suatu Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948-1949” digunakan penulis sebagai salah satu referensi terhadap bahasan tentang peran Sjafruddin Prawiranegara dalam pembentukan PDRI hingga berakhirnya PDRI.

Berdasarkan *review* penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti, penelitian tentang peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia ini hanya ingin mengembangkan aspek yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya. Penulis memfokuskan kajian pada peranan yang dimiliki oleh Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia. Aspek yang ditekankan penulis adalah peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam masa revolusi pemerintahan Indonesia tahun 1945 hingga kondisi pemerintah darurat republik Indonesia tahun 1948-1949

Gambaran suatu peristiwa sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan yakni dari segi mana memandangnya, dimensi apa yang diperhatikan sampai dengan unsur-unsur apa yang perlu diungkapkan (Abdurrahman, 2007: 23). Untuk mempermudah penulis dalam mengembangkan penelitian mengenai “*Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949*” dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan ini merupakan ilmu tentang kekuasaan, otoritas, dan komando di dalam semua masyarakat yang bukan saja masyarakat nasional tetapi juga masyarakat lokal. Dalam setiap kelompok manusia, ada orang yang memerintah dan mereka yang mematuhi, mereka yang memberikan perintah dan mereka yang mentaatinya, serta mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan (Duverger, 1993: 18-19). Pendekatan sosiologi politik ditujukan kepada para pembuat keputusan yang memiliki kekuasaan-kekuasaan yang langsung menentukan perkembangan politik dan jalannya pemerintahan suatu masyarakat. Pendekatan sosiologi politik dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan terkait dengan peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam masa revolusi pemerintahan Indonesia tahun 1945-1948 dan peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam kondisi

pemerintah darurat republik Indonesia. Tujuan dari penggunaan sosiologi politik dalam penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Sjafruddin Prawiranegara pada saat menjadi bagian dari pemerintahan republik Indonesia maupun mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori peran atau *role position* yang dikemukakan oleh Levinson sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang akan dikaji. Teori peran merupakan proses dinamis terhadap suatu kedudukan dari perilaku seseorang yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu atau perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu (Bruce J.Coen, 1992: 76). Pada teori peran ada tiga langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, tentang peranan dari seseorang itu sendiri yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisinya dalam stratifikasi masyarakat. Kedua, dalam teori peran mencakup suatu konsep tentang tindakan yang dapat dilakukan seseorang dalam masyarakat. Ketiga, perilaku seseorang yang mempunyai kedudukan penting bagi struktur masyarakat (Levinson dalam Soerjono Soekanto, 2009: 221). Oleh karena itu, penulis menggunakan teori peran untuk menganalisis peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1949.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode Sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi penelitian sejarah, menialai secara kritis dan kemudian menyajikan dalam bentuk tulisan. Gosttschalk (1985: 32) mendefinisikan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang outentik, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah yang dapat dipercaya. Penelitian ini bersifat studi pustaka yang menganalisis data menggunakan bahan kepustakaan. Langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah dibagi menjadi empat tahap, yaitu 1) Heuristik 2) Kritik 3) Interpretasi dan 4) Historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peranan dari Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia khususnya dalam kurun waktu 1945-1949.

Berdasarkan keempat tahap dalam metode penelitian sejarah di atas, maka langkah pertama dalam penelitian ini adalah heuristik. Langkah ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dikaji. Sesuai dengan tujuan langkah heuristik tersebut peneliti mencari dan mendapatkan sumber tentang peranan politik Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia. Sumber-sumber dalam penulisan ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan oleh para saksi mata. Sumber primer yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu: (1) *Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)* (1984) karya Mr. S. M. Rasjid, (2) *Sejarah sebagai Pedoman untuk Membangun Masa Depan* (1976) karya Sjafruddin Prawiranegara.

Sumber sekunder adalah sumber sejarah penunjang dalam penelitian yang akan dikaji. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu: (1) *Sejarah Nasional Indonesia VI* (1993) karya Nugroho Notosusanto, (2) *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-*

1998 (2008) karya Taufik Audrey Kahin, (3) *PRRI: Pemberontakan atau Bukan?* (2008) karya Syamdani, (4) *Sjafruddin Prawiranegara: Lebih Takut Kepada Allah SWT* (1986) karya Ajip Rosidi, (5) *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan* (1989) karya Audrey Kahin, (6) *PRRI PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (1997) karya R.Z. Leirissa, (7) *Mr Sjafruddin Prawiranegara: Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah* (2011) karya Mohammad Noer dan Lukman Hakiem, (8) *Agama dan Bangsa: Pembangunan dan Masalah-masalahnya* (2011) karya Sjafruddin Prawiranegara, (9) *Ekonomi dan Keuangan* (2011) karya Sjafruddin Prawiranegara, (10) *Indonesia Abad ke 20 jilid 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III* (1988) karya G. Moedjanto.

Selain sumber primer dan sumber sekunder masih terdapat jenis sumber yang disebut dengan sumber tersier, yaitu berupa tesis, skripsi, disertasi, dan jurnal. Sumber tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu: (1) *Pemikiran Dakwah Mr. Sjafruddin Prawiranegara* (2001) Karya Sriyanto, (2) *Konsep Pembangunan Perekonomian Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Bung Hatta dan Sjafruddin Prawiranegara* (2014) Karya Budiawati, (3) *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) : Suatu Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948-1949* (2013) Karya Permana.

Penelitian ini bersifat studi literatur oleh sebab itu langkah pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau sumber-sumber seperti buku-buku dan pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian. Dokumen berupa buku-buku, laporan penelitian yang relevan, artikel dan jurnal yang diperoleh dari berbagai perpustakaan; seperti Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Perpustakaan Pendidikan Sejarah, Internet, dan toko-toko buku *online*.

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan sumber adalah melakukan kritik atau verifikasi terhadap sumber yang didapat. Data-data yang diterima dari berbagai sumber harus diteliti kebenarannya, agar melahirkan fakta sejarah yang benar-benar dapat dipercaya. Kegiatan yang dilakukan penulis pada langkah kritik

terhadap sumber-sumber data yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik adalah berusaha mengetahui kebenaran isi, keaslian, dan keutuhan sumber tersebut. Kritik sumber dalam penelitian sejarah dibagi menjadi dua tahap yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kegiatan kritik ekstern dilakukan dengan melihat secara teliti dari sampul, judul, tahun terbit, nama pengarang, latar belakang, dan sebagainya apakah sesuai dan sezaman dengan masalah yang dibahas. Kelanjutan dari kritik ekstern, kemudian dilakukan kritik intern. Kritik intern bertujuan untuk meneliti kebenaran isi sumber yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh data yang valid berupa fakta sejarah. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan kritik adalah menetapkan otentitas dari sumber yang diuji untuk menghasilkan fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan hasil kritik ekstern dan intern yang sudah dilaksanakan, terdapat sumber primer dan sumber sekunder yang lebih valid untuk digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

Sumber primer yang dianggap valid dan relevan dalam penelitian ini adalah: (1) *Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)* (1984) karya Mr. S. M. Rasjid

Sumber sekunder yang dianggap valid dan relevan dalam penelitian ini adalah: (1) *Sejarah Nasional Indonesia VI* (1993) karya Nugroho Notosusanto, (2) *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (2008) karya Taufik Audrey Kahin, (3) *PRRI: Pemberontakan atau Bukan?* (2008) karya Syamdani, (4) *Sjafruddin Prawiranegara: Lebih Takut Kepada Allah SWT* (1986) karya Ajip Rosidi, (5) *PRRI PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (1997) karya R.Z. Leirissa, (6) *Mr Sjafruddin Prawiranegara: Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah* (2011) karya Mohammad Noer dan Lukman Hakiem.

Langkah berikutnya setelah melakukan kritik adalah interpretasi. Ada dua macam interpretasi yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan data-data yang diperoleh, sedangkan sintesis berarti menyatukan data-data sehingga ditemukan fakta sejarah (Abdurahman, 2007: 68). Fakta-fakta dari sumber sejarah yang sudah diperoleh disusun secara kronologis, menghubungkan-hubungkan antara

fakta satu dengan fakta lainnya sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif dan rasional dengan berdasarkan pada aspek pembahasan sebagai berikut.

- 1) Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam masa revolusi pemerintahan Indonesia, ditunjang dengan sumber-sumber dari buku *Sjafruddin Prawiranegara: Lebih Takut Kepada Allah SWT* (1986) karya Ajip Rosidi dan buku *Indonesia Abad ke 20 jilid 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III* (1988) karya G. Moedjanto.
- 2) Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam kondisi pemerintah darurat republik Indonesia, ditunjang dengan sumber-sumber dari buku *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (2008) karya Taufik Audrey Kahin dan buku *Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indoneisa)* karya S.M. Tasjid.

Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah ini adalah Historiografi. Menurut Gottschalk (1985:32) historiografi adalah kegiatan rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah. Kegiatan menyusun dan menulis kisah atau cerita sejarah ini diperlukan suatu kemampuan dan kemahiran dari seorang sejarawan sehingga fakta-fakta sejarah dapat dirangkai secara kronologis, logis, dan sistematis. Langkah historiografi yang dilakukan oleh peneliti adalah menuliskan cerita sejarah tentang peranan politik Sjafruddin Prawiranegara dalam pemerintahan Indonesia dengan merangkai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh menjadi sebuah kisah sejarah ilmiah yang jelas, rasional, logis dan objektif.

Penyajian dari hasil penelitian ini adalah penyusunan fakta-fakta dari peristiwa dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang tersusun dalam tujuh bab. Bab 1 merupakan pendahuluan dari penelitian ini. Bab 1 pada penelitian ini memaparkan 1.1 tentang permasalahan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, 1.2 penegasan pengertian judul: berupa penjelasan mengenai makna yang terkandung dalam judul penelitian ini yaitu “Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949”, 1.3 ruang lingkup penelitian: dibagi menjadi tiga bagian yaitu temporal (waktu), spasial (tempat) dan material (materi yang dibahas), 1.4 rumusan masalah: berupa

permasalahan yang disusun secara sistematis dilihat dari latar belakang yang ada, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. berdasarkan latar belakang, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang ingin dikaji. Permasalahan tersebut nantinya akan terjawab melalui fakta-fakta yang diperoleh dari pengumpulan literatur, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dan penelitian dapat bermanfaat. Bab 2 tinjauan pustaka, pada penelitian ini memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949 dan teori-teori serta pendekatan yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik dan teori peran untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada bab 1. Bab 3 metode penelitian. Pada penelitian ini memaparkan tata cara dalam memperoleh data, menyeleksi data, memaknai fakta dan merekonstruksi sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian sejarah yang didalamnya terdapat empat tahap yaitu heuristik (pencarian dan pengumpulan sumber), kritik (analisis sumber), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penyajian).

Deskripsi hasil penelitian ini diuraikan pada bab 4, bab 5, dan bab 6. Bab 4 membahas tentang peranan sjafruddin prawiranegara sebagai anggota BP KNIP tahun 1945. Bab 5 membahas bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan tahun 1946-1947. Bab 6 membahas bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri kemakmuran tahun 1948-1949. Bab 7 berisi tentang simpulan dan saran dari keseluruhan karya ilmiah ini.

BAB 4. LATAR BELAKANG SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI ANGGOTA BP KNIP TAHUN 1945

4.1 Latar Belakang Pendidikan dan Sosial-Politik

Sjafruddin Prawiranegara menjadi salah satu tokoh nasional selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, posisi Sjaruddin pada masa tersebut tentunya tidak serta-merta didapatkan dengan cara yang instant, melainkan melewati berbagai macam proses dan banyak hal yang melatarbelakangi Sjafruddin untuk menjadi salah satu tokoh nasional yang cukup berpengaruh pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

4.1.1 Latar Belakang Pendidikan

Sjafruddin Prawiranegara dibesarkan dari keluarga keturunan Banten. Sjafruddin Prawiranegara dilahirkan dan dibesarkan hingga kelas tujuh di ELS tanah kelahirannya, masa kecilnya Sjafruddin Prawiranegara akrab dipanggil Kuding. Masyarakat Banten dalam mengajarkan anak-anak kecil dibiasakan diri untuk menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa, Mereka diajarkan mengaji Alquran secara sungguh-sungguh. Banyak juga dari mereka dikirimkan ke Pesantren untuk mempelajari ajaran agama Islam secara mendalam. Sjafruddin Prawiranegara, sejak usia dini telah dididik untuk menjalankan syariat Islam setelah dikhitan terus mulai belajar mengaji Alquran secara sungguh-sungguh walaupun tidak mengerti akan terjemahannya.

Awal pendidikan Sjafruddin Prawiranegara menuntut Ilmu yaitu memasuki Sekolah Rendah "*Eorpeesche Lagere School*" ELS di Serang Banten. Di ELS murid diwajibkan menggunakan bahasa Belanda. Di rumah, ayahnya pun dibiasakan berbahasa Belanda sehingga Sjafruddin Prawiranegara sejak kecil sudah fasih berbahasa Belanda dan Sunda sebagai bahasa daerahnya. Suasana kehidupan di Banten yang taat oleh norma-norma agama Islam dan pendidikan di rumah sangat besar pengaruhnya pada diri Sjafruddin Prawiranegaraselanjutnya (Rosidi, 2011:49-50).

Setelah lulus dari ELS, Sjafruddin Prawiranegara melanjutkan pendidikannya ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yaitu setingkat dengan sekolah lanjutan tingkat pertama di Madiun. Ketika masa sekolahnya Sjafruddin Prawiranegara mempelajari ajaran agama Islam secara mendalam dan baru mengetahui Al-qu'an lewat terjemahan dalam Bahasa Belanda, meskipun Sjafruddin Prawiranegara menginjak dewasa baginya tidak ada kata terlambat. Sjafruddin Prawiranegara sangat bersemangat belajar Bahasa Arab guna memahami ajaran Islam dan makna Alqur'an dengan baik.

Selain itu Sjafruddin Prawiranegara juga gemar membaca buku dengan adanya perpustakaan di sekolah memudahkannya untuk meminjam buku. Sjafruddin Prawiranegara sudah suka membaca ketika ia duduk di ELS, Buku apa saja yang sampai di tangannya pasti membacanya sehingga pada waktu itu Sjafruddin Prawiranegara sudah mengenal karya-karya utama kesustraan di Eropa misalnya Charles Dickens semuanya dibaca dalam Bahasa terjemahan Bahasa Belanda. Dan yang utama karena ayahnya sendiri mempunyai perpustakaan pribadi yang lumayan lengkap. Ayahnya sangat senang apabila anak-anaknya memiliki hobi membaca dan memanfaatkan buku-buku yang dimilikinya. Ayahnya pun mendorong kegemaran akan membaca yang dianggapnya sebagai kunci kemajuan.

Kemudian Sjafruddin Prawiranegara melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yaitu *Algeemeene School* (AMS) di Bandung pada tahun 1934. Pada masa menjadi mahasiswa beliau menjadi anggota Unitas Studiosorum Indonesia USI, sebuah organisasi mahasiswa yang merupakan forum pergaulan pelajar sekolah tinggi. Sjafruddin Prawiranegara di masa mudanya, yakin akan kebenaran Islam walaupun beliau juga mengetahui Ideologi seperti *Kapitalisme* dan *Komunisme* secara mendalam Saat bersekolah di perguruan tinggi itu, Hal ini membuat beliau terdorong untuk mendalami ajaran Islamnya. Baru setelah ada terjemahan Al-quran dalam bahasa Belanda dan Inggris. Pada tahun 1934, baru dapat memahami makna yang tertulis dalam bahasa Belanda itu, tetapi untuk benar-benar memahami makna Al-quran sehingga tidak berlawanan dengan logika dan dapat sepenuhnya dia terima sebagai pedoman hidup. Sjafruddin Prawiranegara merasa

memerlukan studi yang lama dan tekun dalam berbagai bidang ilmu, khususnya Sejarah, Filsafat dan Perbandingan Agama. Dan sadar bahwa penguasaan Bahasa Arab adalah suatu hal mutlak untuk dapat menghayati kedalaman dan kebenaran ajaran-ajaran Al-qur'an.

Setelah bertahun-tahun sampai sesudah Sjafruddin Prawiranegara masuk ke Universitas, Sjafruddin Prawiranegara dilanda kebimbangan. Batinnya masih dalam pencarian. Teman-temannya di kampus tidak banyak yang dapat diajak bicara mengenai masalah agama. Karena diantara mereka yang membaca buku sosialisme dan mereka bukanlah orang yang taat memegang teguh ajaran Islam. banyak berdiskusi tentang paham sosialisme. Di tambah Sjafruddin Prawiranegara merasa tidak dekat dengan ayahnya selama ini ia dapat berdiskusi melalau surat. Ayahnya selalu berbahasa Belanda dan lebih senang berpakaian Barat meskipun begitu bukan berarti Sjafruddin Prawiranegara tidak hormat kepada beliau, ayahnya dalam lingkungan rumah tangganya tetaplah bertindak sebagai seorang ayah seperti orang timur yang memelihara jarak tertentu dengan anak-anaknya. Sjafruddin Prawiranegara jarang sekali berbicara dari hati ke hati demikian pula saudaranya. Sjafruddin Prawiranegara merasa segan kalau harus berhadapan dan berbicara dengan ayahnya sampai hampir saja terjerumus dalam lingkungan Sosialis.

Saat Sjafruddin Prawiranegara hampir menyelesaikan skripsinya, ayahnya Arsyad Prawiranegara meninggal dunia pada bulan Maret 1939. Dalam waktu kurang lebih enam bulan setelah ayahnya pergi, Sjafruddin Prawiranegara berhasil menyelesaikan skripsinya itu dengan baik, akhirnya lulus dan melanjutkan ke melanjutkan ke HRS (Rechts Hoge School, sekolah tinggi hukum) di Jakarta sekarang menjadi Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. sebagai *Meester in de Rchten* (Sarjana Hukum). Setelah menamatkan HRS pada tahun 1939 masih ingin mencari tahu sosok ayahnya. Dengan ayahnya Sjafruddin Prawiranegara sedikit sekali punya kesempatan bicara. Ayahnya pun jarang memiliki waktu luang kepada anak-anaknya karena beliau seorang yang aktif bekerja. Sjafruddin Prawiranegara bisa menanyakan kepada teman-teman ayahnya termasuk M. Soetarjo Kartohadikusumo adalah Patih Gresik, menurutnya ayahnya menjadi

anggota organisasi PPPB (Perkumpulan Pegawai Pangreh Praja Bumi Putera) dan ayahnya mempunyai peranan penting di dalamnya. Ketika ayah Sjafruddin Prawiranegara meninggal, beliau sedang mengadakan pidato dalam sebuah rapat yang diselenggarakan perkumpulan tersebut dan beliau tinggal di Betawi (Jakarta).

Sjafruddin Prawiranegara berhak mempergunakan gelar kebangsawanan “Raden” di depan namanya. Namun Sjafruddin Prawiranegara tidaklah memakainya, merasa cukup dengan gelar yang diperolehnya dengan kerja keras, belajar bertahun-tahun gelar Mr. adalah singkatan dari *Meester in de Rechten*. Menurutny di zaman kolonial dalam kehidupan sehari-hari orang tidak selalu menggunakan gelar Feodal, tetapi untuk melamar suatu pekerjaan di dalam pemerintahan gelar dan keturunan itu sangat menentukan. Sjafruddin Prawiranegara hanya memakai nama “tua” yaitu nama Prawiranegara dari kakeknya. Keluarganya ayahnya Arsyad Prawiranegara, pamannya Raden Mohammad Prawiranegara dan adiknya Dr, Drajat Democrat Prawiranegara memang semua memakai nama belakang yang sama.

Karena beliau ditinggal oleh ayahnya, semasa hidupnya mencari sendiri jawaban atas pertanyaan yang muncul saat masih di AMS tentang hakikat hidup. Sjafruddin Prawiranegara ingin memperoleh kebenaran dan keyakinan tentang tujuan hidup. Setelah Sjafruddin Prawiranegara lulus dari AMS, Sjafruddin Prawiranegara meneruskan hidup dengan melamar pekerjaan pada Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) yang diketahuinya dari M. Soetarjo Kartohadikusumo sahabat almarhum ayahnya, Sjafruddin Prawiranegara ditempatkan di administrator PPRK dan merangkap sebagai redaktur majalah PPRK *Soeara Timoer* tetapi Sjafruddin Prawiranegara bekerja disini hanya beberapa bulan saja. Setelah itu, pada tahun 1940 Perang Dunia ke II di Eropa, yaitu setelah negeri Belanda di serang oleh tentara Jerman, membuat kolonial terpaksa menerima banyak tenaga Indonesia, maka ditempatkan dipemerintahan keadaan itu yang membuat Sjafruddin Prawiranegara bersama tiga temannya diterima di Departement van financien (Departemen Keuangan) di tempatkan di kantor inflansi pajak di Kediri, untuk membantu masalah keuangan di Indonesia.

Setelah menduduki jabatan yang cukup dan merasa sudah cukup untuk membangun rumah tangga. Di usianya yang tiga puluh tahun. Sjafruddin Prawiranegara menikah Pada tanggal 31 Januari 1941 Sjafruddin Prawiranegara dengan gadis Bandung bernama Tengku Halimah, panggilannya Lily. Dan memiliki 6 orang anak, diantaranya: Aisyah, Salvyah, Chalid, Farid, Chalidah, Faridah, Rasyid, dan Yazid.

4.1.2 Latar Belakang Kehidupan Sosial Politik

Sjafruddin Prawiranegara lahir di Anyar Kidul, Banten 28 Februari 1911. Sjafruddin Prawiranegara merupakan anak dari Raden Arsjad Prawiraatmadja dan Noer'aini. Raden Arsjad Prawiraatmadja seorang asisten Wedana (camat) di Anyar Kidul, Kabupaten Serang, Karesidenan Banten. Raden Arsjad masih keturunan Sultan Banten dari perkawinan R. H. Chattab Aria Prawiranegara dengan istri kedua yaitu Nyi Mas Hajah Salbiah. Noer'aini, merupakan putri dari Mas Abidin Mangoendiwirja camat di Cening, Kawedanan Kubangkondang, kabupaten Pandeglang, Karesidenan Banten. Mas Abidin Mangoendiwirdja putera Soetan Alam Intan dari Minangkabau yang masih keturunan Pagaruyung (Kahin, 1989: 101).

Sejak kecil Sjafruddin Prawiranegara dididik untuk menjalankan Syariat Islam. Setelah dikhitan, diajari mengaji Al-Qur'an, dan berpuasa yang dimulai dari usia 4 atau 5 tahun. Sjafruddin kemudian masuk ke ELS (Europeesche Lagere School, atau Sekolah Rendah untuk orang-orang Eropa yaitu orang Belanda atau Eropa lainnya serta yang dianggap sederajat). Di ELS, Sjafruddin diwajibkan untuk menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa yang dipakai di sekolahnya dan juga dibiasakan menggunakan bahasa Belanda dengan Raden Arsjad saat berada di rumah, walaupun dengan saudara yang lain menggunakan bahasa Sunda (Rosidi, 2011: 49-50).

Pada tahun 1924, Raden Arsjad dipindahkan tugasnya ke Ngawi di Jawa Timur (Rosidi, 2011: 36-38). Pemandahan seorang pegawai pamong praja dari satu tempat ke tempat lain, asalkan satu provinsi adalah hal yang biasa. Namun pemindahan sampai ke karesidenan lain, bahkan ke provinsi lain dari Serang di

Provinsi Jawa Barat ke Ngawi di Provinsi Jawa Timur, mempunyai arti pemindahan sebagai hukuman administratif.

Raden Arsjad meninggal pada tanggal 3 Maret 1939 ketika sedang berpidato dalam suatu rapat untuk pemilihan anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Pidatonya diselingi kutipan ayat Al-Qur'an untuk memperkuat maksud uraiannya, dan banyak mendapat perhatian dari rakyat Jawa Timur. Perilaku dan langkah-langkah ayahnya sebagai priyayi yang tetap berjuang untuk kepentingan rakyat dengan berpedoman pada Kitab suci Al-Qur'an, banyak dicontoh oleh Sjafruddin Prawiranegara. Sebagai priyayi Raden Arsjad berjuang untuk kepentingan rakyat dengan tetap berpedoman kepada Al-Qur'an, merupakan watak yang diturunkan kepada Sjafruddin yang selalu memperlihatkan sikap tegas dan dalam menghadapi suatu dilema (Rosidi, 2011: 41-43).

Kehidupan Raden Arsjad sebagai priyayi tidak menghalanginya untuk dekat dan memperjuangkan nasib rakyat. Walaupun menjadi anggota Sarekat Islam, Raden Arsjad memakai pakaian Barat, karena SI tidak mengharamkan orang Islam berpakaian Barat. Raden Arjad juga menghendaki anak-anaknya bersekolah secara Barat, tidak seperti masa kecilnya yang dimasukkan ke pesantren. Tiap sore anak disuruh belajar mengaji dan tetap berpedoman kepada Al-Qur'an sambil tetap melaksanakan semua kewajiban sebagai seorang muslim yang taat sesuai dengan aturan-aturan Islam. Raden Arsjad sering ceramah dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Kombinasi budaya dan gaya hidup itulah yang menyebabkan Raden Arsjad dapat diterima kalangan santri dan abangan. Semua sikap Raden Arsjad dan lingkungan beragama itu menjadi pedoman yang membuat Sjafruddin dapat bergaul dengan kalangan santri modernis dan kaum sosialis sekuler (Rahardjo, 2011:69).

Sjafruddin mengikuti ayahnya pindah ke Ngawi. Di Ngawi Sjafruddin dimasukkan ke ELS juga (Rosidi, 1986:251), sesudah tamat dari ELS, Sjafruddin melanjutkan sekolah ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yaitu Pendidikan Dasar yang diperluas, sama dengan SMP sekarang) atas saran K. De Bijl yang merupakan kepala guru ELS Ngawi. Sjafruddin melanjutkan lagi sekolah ke AMS (*Algemeene Middlebare School*) Sekolah Menengah Umum, setingkat

dengan SMA sekarang) A di Bandung karena ketertarikannya terhadap kesusasteraan. Sesudah menamatkan AMS pada tahun 1931, Sjafruddin melanjutkan ke RHS (*Rechts Hoge School* /Sekolah Tinggi Hukum) yang didirikan di Jakarta tahun 1924. Awalnya Sjafruddin ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi Sastra, namun di Indonesia belum ada, dan baru didirikan tahun 1941. Tidak mungkin juga untuk pergi ke Belanda karena keadaan keuangan keluarga, maka Sjafruddin memutuskan masuk ke RHS. Pada bulan September 1939, Sjafruddin lulus sebagai Meester in de Rechten/Sarjana Hukum.

Sjafruddin melamar pekerjaan di Perserikatan Perkumpulan-perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) yang diketuai oleh M. Soetardjo Kartodikoesoemo, setelah menamatkan pendidikannya di RHS. Sjafruddin diterima di PPRK dan ditempatkan sebagai administratur PPRK merangkap sebagai redaktur Soera Timoer yaitu majalah PPRK. Pada tahun 1940 Sjafruddin diterima bekerja di Departement van Financien (Departemen Keuangan), dan ditempatkan di Kantor Inspeksi Pajak Kediri, Jawa Timur. Kemantapan kehidupannya dengan jabatan yang cukup tinggi pada masa itu membuat Sjafruddin merasa sudah saatnya menikah. Pernikahan dilangsungkan di Buahbatu, Bandung pada tanggal 31 Januari 1941. Sjafruddin menikah dengan Tengku Halimah, puteri dari Radja Sahaboedin seorang Camat di Buahbatu Bandung keturunan dari raja Minangkabau dari Pangaruyung (Kahin, 1989:101).

Sjafruddin pernah aktif dalam organisasi mahasiswa yang bernama USI (*Unitas Studiosorum Indonesiensis*) ketika menjadi mahasiswa RHS. erhimpunan mahasiswa ini didirikan pada tahun 1933. Para mahasiswa Indonesia memilih menjadi anggota USI karena tidak suka berpolitik tetapi juga tidak ingin masuk *Studenten Corps* yang anggotanya terutama mahasiswa-mahasiswa Belanda yang hanya bersenang-senang, dan terlalu mahal bagi mahasiswa Indonesia. Aktivitas USI terbatas hanya dalam bidang rekreasi dan kegiatan yang menunjang studi. Organisasi ini tidak ikut campur dalam politik. Kegiatankegiatan yang diselenggarakan antara lain berdiskusi, bermain olahraga, membaca, dan berdarmawisata (Rosidi, 2011: 79-80). Komunitas USI dibentuk oleh sejumlah Profesor konservatif Belanda untuk menekan kecenderungan radikal kelompok

pemuda dan mahasiswa yang mengusung nasionalisme Perkumpulan USI ini berorientasi pada budaya dan gaya hidup Eropa (Rahardjo, 2011:62).

Para mahasiswa USI merupakan laki-laki dan perempuan dengan pendidikan Belanda yang baik. Kebanyakan berasal dari keluarga pribumi berada dan melakukan kegiatan yang necis. Anggota USI memiliki lagu kebangsaan yang terdapat dalam Liedboek (Mrazek, 2006: 210-211). Lagu-lagu ini yang dapat mereka nyanyikan pada pertemuan-pertemuan, pesta-pesta, dan piknik USI. Lagu pertama yaitu Gaudeamus, Wij Usianen (Kami, para anggota USI), dan USI Lied (Lagu USI). Lagu-lagu lain dalam Liedboek van USI adalah Mutsenlied (Lagu Sebuah Topi), Crambambuli, Jingle Bels, Groenenlied (Lagu Kesibukan), Stein Song (Lagu Tempat Air), dan sebagainya. Anggota-anggota dari organisasi USI antara lain Sjafruddin Prawiranegara, Subadio Sastrosatomo, Ali Budiarjo, Poppi Saleh dan saudaranya, Soedjatmoko, Koesoemo Soetojo, Mr. Ismael Thajeb, Soedarpo, Mohammad Kosasih Purwanegara dan lainnya. Sjafruddin tidak tertarik untuk ikut dalam gerakan kebangsaan. Namun, bukan berarti Sjafruddin tidak menaruh perhatian pada kegiatan-kegiatan pergerakan nasional. Melalui surat kabar, majalah dan buku, juga melalui kuliah di RHS, Sjafruddin memahami dan mengamati soal-soal kemasyarakatan, termasuk kegiatan pergerakan nasional (Rosidi, 2011: 80).

Sjafruddin menginginkan kemerdekaan Indonesia lepas dari jajahan Belanda. Namun tidak setuju pada tuntutan sebagian besar kaum nasionalis bahwa Indonesia harus merdeka saat itu. Menurut Sjafruddin, bangsa Indonesia saat itu belum matang untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Sjafruddin termasuk golongan kooperatif, yaitu orang-rang yang beranggapan bahwa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia haruslah melakukan kerjasama dengan pihak Belanda (Prawiranegara, 1972: 319). Pandangan Sjafruddin ini banyak dipengaruhi oleh guru besarnya di RHS, seperti Prof. Logemann dan Prof. Van Asbek. Keduanya termasuk orang Belanda yang menganut pandangan Politik Etis. Untuk mencapai kemerdekaan itu, bangsa Indonesia haruslah maju dahulu dalam segala bidang. Kemajuan itu hanya dapat dicapai melalui pendidikan (Tim Penulis, 1990: 379).

Sjafruddin melihat bahwa pemerintah kolonial tidak bersungguh-sungguh untuk memajukan Indonesia. Dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhannya, terlalu sedikit orang Indonesia yang mendapatkan pendidikan, yang mendapatkan latihan dan mendapat kesempatan bekerja (Tim Penulis, 1990: 379). Kenyataan ini menimbulkan keraguan pada diri Sjafruddin. Keraguan itu menjadi ketidakpercayaan ketika pada bulan November 1938 pemerintah menolak Petisi Soetardjo. Isi dari Petisi Soetardjo yaitu mendesak pemerintah agar segera menyelenggarakan konferensi guna membahas hubungan antara Nederland dengan Hindia Belanda (Ricklefs, 1991: 288-289).

Indonesia mempunyai anggapan bahwa kedatangan Jepang akan memerdekakan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah, maka kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan gembira oleh rakyat. Sjafruddin segera melihat dalam waktu dekat bahwa harapan untuk terjadinya perbaikan seperti yang dipropagandakan Jepang hanyalah kata-kata kosong. Sjafruddin melihat kesengsaraan rakyat yang diakibatkan oleh Jepang jauh lebih buruk dari penjajahan Belanda. Kemunduran ekonomi, kelaparan yang semakin meningkat, sebagai akibat pengurusan kekayaan dan tenaga manusia oleh Jepang. Sjafruddin merasa heran melihat banyak pemimpin bangsa Indonesia yang mau bekerjasama dan membantu tentara Jepang. Padahal mereka menolak bekerjasama dengan pemerintahan Belanda. Jepang lebih kejam dari Belanda dan orang Indonesia tidak akan berani secara terang-terangan menentangnya. Namun, menurut Sjafruddin bukan berarti orang Indonesia harus menjilat kepada Jepang dengan menindas bangsa sendiri. Sjafruddin sebagai pegawai negeri bekerjasama dengan Jepang, tetapi kerjasama itu dilakukan karena keadaan yang memaksa Negara.

Sikap Belanda yang tidak mau kompromi pada masa akhir pemerintahan, yang tidak mau memberikan kesempatan pada bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa matang dan merdeka, serta penderitaan rakyat yang luar biasa di bawah penjajahan Jepang, membuat Sjafruddin mulai sadar bahwa bangsa Indonesia harus berjuang untuk merdeka. Sjafruddin mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok yang sepaham dengannya. Seperti kelompok Pagoejoeban Pasoendan dengan tokohnya Oto Iskandar Dinata dan Ir. Oekar Bratakoesoemah, kelompok

Parindra dengan tokohnya Gondokusumo dan Dr. Erwin, kelompok Islam dengan tokohnya Arudji Kartawinata dan M. Natsir. Sjafruddin juga berhubungan dengan teman-teman semasa mahasiswa di USI dulu seperti Subandio Sastrosatomo, Koesoema Soetojo, Mr. Ismael Thajeb, dan Ali Budiardjo yang mempunyai sikap dan pikiran yang sama. Melalui mereka, Sjafruddin mengadakan kontak dengan gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh sutan Sjahrir di Jakarta (Rosidi, 2011: 91-93).

Pada tanggal 6 April 1945 di Karesidenan Bandung, diadakanlah pertemuan para pengusaha seluruh Jawa dan Madura itu. Pertemuan ini dihadiri tokoh-tokoh pengusaha, dan tokoh-tokoh ekonomi non-pengusaha. Pertemuan besar para pengusaha seluruh Jawa dan Madura melahirkan sebuah badan baru yang dinamakan Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE). Pusatnya di Jakarta, dengan cabang-cabang di beberapa daerah Jawa. Dalam sidang-sidang selanjutnya, Sjafruddin Prawiranegara sempat memimpin salah satu sidangnya. Suasana pada umumnya didominasi oleh para pengusaha meskipun banyak juga tokoh-tokoh non-pengusaha yang hadir. Pada pemilihan pengurus, Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjadi pegawai pajak dan pegawai Departemen Keuangan di Bandung terpilih sebagai ketua. Setelah rapat di Bandung dan rapat-rapat berikutnya sampai sampai dibubarkannya organisasi ini kelak tahun 1949, di Yogyakarta, Sjafruddin tidak pernah memimpin atau duduk di kursi ketua di Kantor Pusat PTE Jakarta (Halilintar, 1986: 140-142).

Pada pertengahan bulan Agustus 1945, Sjafruddin sudah mendengar tentang kemungkinan Jepang menyerah pada Sekutu. Setelah membicarakan berita itu dengan teman-temannya, Sjafruddin dan Hasbullah Siregar diberi kepercayaan untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang kebenaran berita itu di Jakarta (Prawiranegara, 1972: 320). Sjafruddin dan Hasbullah berangkat ke Jakarta tanggal 15 Agustus dan orang yang pertama kali ditemuinya adalah Oto Iskandar Dinata. Sewaktu mendengar berita yang disampaikan Sjafruddin dan Hasbullah, ternyata Oto Iskandar Dinata tidak percaya dan menasehati supaya berhati-hati berbicara dan dapat celaka jika didengar Jepang. Adanya ketakutan

seperti itu, Sjafruddin dan Hasbullah tidak terus mencoba untuk menghubungi yang lainnya, dan juga tidak berani pulang ke Bandung (Rosidi, 2011: 93-95).

Sjafruddin dan Hasbullah tinggal di rumah salah seorang teman Hasbullah di Bilangan Jatinegara selama dua hari. Setelah mendengar berita penyerahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan, mereka baru berani keluar. Bagi Sjafruddin, proklamasi kemerdekaan itu merupakan puncak perjuangan pergerakan nasional sebagai keharusan sejarah dan kemerdekaan itu merupakan satu-satunya alternatif untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Meskipun Sjafruddin merasa bangsa Indonesia masih belum mempunyai tenaga yang terampil dan ahli dalam berbagai bidang untuk mengelola sebuah negara yang merdeka, namun menjadi yakin bahwa segala kekurangan akan segera dapat diatasi dalam perjalanan waktu. Bangsa Indonesia harus belajar bagaimana menyelenggarakan sebuah pemerintahan dan mengelola sebuah negara (Prawiranegara, 1972: 320).

Sjafruddin menyatakan revolusi Indonesia bertujuan untuk menghapuskan sistem penjajahan dan menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Tujuan dari revolusi Indonesia yakni keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Sistem yang diperlukan lebih lanjut ialah sistem masyarakat, susunan politik dan ekonomi yang dapat menjamin terlaksananya keadilan sosial serta kemakmuran rakyat yang tidak dapat dicapai pada masa lampau karena adanya colonial kapitalisme Belanda. Paham yang cocok untuk kebutuhan revolusi nasional ialah paham “sosialis religius”. Dasar dari sosialisme sebagai pedoman revolusi nasional Indonesia itu disandarkan pada kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Bagi sosialisme religius, sosialisasi atau nasionalisasi dari berbagai alat produksi masyarakat itu, bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya suatu alat atau cara mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Sosialisasi perlu dilaksanakan serta harus dihubungkan dengan kondisi dan situasi (Noer, 2000: 143).

Pandangan “sosialis religius” yang dicetuskan dalam buku Politik dan Revolusi Kita (1948) menekankan sosialisme sebagai cita-cita kemasyarakatan berdasarkan pandangan hidup Islam. Pengaitan Sjafruddin dengan gagasan sosialisme lebih terkait dengan kritiknya terhadap komunisme. Komunisme

adalah ideologi atheis yang bertentangan dengan Islam dan semua agama. Islam tidak mengakui adanya masyarakat tanpa kelas. Walaupun Islam mengakui kelas-kelas dalam masyarakat, Sjafruddin tidak menyetujui perjuangan kelas. Sjafruddin memilih cara lain, yakni menetapkan kewajiban kepada orang kaya untuk membantu orang miskin, supaya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin berkurang (Rahardjo, 2011: 90-96).

Pikiran-pikiran yang disampaikan pada ceramah yang diterbitkan dengan judul “Tinjauan Singkat tentang Politik dan Revolusi Kita” sangat realistis, terusterang dan penting. Kahin menganggap tulisan Sjafruddin itu cukup penting. Disebutnya uraian itu tentang gagasan sosialis religius, pemikiran Sjafruddin terpengaruh oleh pandangan modern Islam, sedang Sjafruddin disebut sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh sekali dan dikatakan bahwa gagasan-gagasan itu menyebabkan Partai Masyumi semakin berpengaruh pada waktu itu (Kahin, 1989: 102).

Sjafruddin menjadi anggota Masyumi tahun 1945 setelah dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang mengharuskan setiap anggota KNIP harus memilih dan masuk kedalam salah satu partai. Hidup dalam lingkungan muslim terutama ayahnya yang saleh, maka Sjafruddin memilih masuk Masyumi. Sjafruddin masuk dalam anggota pimpinan pusat Masyumi. Peran Sjafruddin dalam partai Masyumi sangat besar, pemikiran Sjafruddin banyak memberikan gambaran ideologi dan kebijakan Masyumi. Seperti pendapatnya mengenai menjaga persatuan untuk sanggup mengorbankan supaya jangan sampai terjadi perpecahan di antara rakyat Indonesia. Pendapatnya ini menjadi salah satu asas Masyumi yang mengajak penganut agama lain untuk bersama-sama berada di jalan Tuhan. Masyumi menganjurkan untuk tidak membenci partai dan melenyapkannya (Noer, 2000: 147).

4.1.3 Biografi Sjafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara lahir di Anyer Kidul, Serang pada tanggal 28 Februari tahun 1911. Sjafruddin Prawiranegara adalah seorang Pahlawan Nasional

Indonesia yang ahli dalam Bidang Hukum, Keuangan dan Agama. Sjafruddin Prawiranegara merupakan negarawan muslim yang banyak memainkan peran penting pada Kemerdekaan, dan tatanan kenegaraan Republik Indonesia. Sjafruddin Prawiranegara wafat pada tanggal 5 Februari 1989.

Sjafruddin Prawiranegara lahir dari pasangan Arsyad Prawiraatmadja dan Noeraini. Dalam diri Sjafruddin Prawiranegara mengalir darah campuran Banten. Ayahnya adalah anak dari Raden Haji Chatab Aria Prawiranegara terkenal panggilanannya Patih Haji yang pernah menjadi patih Kabupaten Serang pada tahun 1879 sampai tahun 1884. Ayahnya masih keturunan Sultan Banten seorang bangsawan yang berpengaruh di Banten tahun 1890an. Buyut dari ibunya yakni Sutan Alam Intan adalah keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat berasal dari keturunan Priyai yang taat beragama, leluhurnya berasal dari Minangkabau (Rosidi, 2011:18-20).

Ketika Sjafruddin Prawiranegara menginjak usia satu tahun orang tuanya bercerai, Ayah Sjafruddin Prawiranegara menikah lagi dengan Raden Suwela. Karena masih balita Sjafruddin Prawiranegara belum mengetahui hal itu, Baru ketika Sjafruddin Prawiranegara berusia tujuh tahun bertemu dengan ibu kandungnya. Pertemuan ini membawanya untuk mengenal keluarga dari pihak ibu kandungnya. seperti Kakak laki-laki ibunya yang bernama Moehammad Mangoendiwirja pada saat itu seorang Camat di Carenang, Banten. Akan tetapi ibu tirinya bersikap baik kepadanya dan kakak perempuannya Siti Maria mengasuhnya hingga mereka besar tanpa menganggap mereka sebagai anak tiri, melainkan sebagai anak kandungnya sendiri. Sehingga Sjafruddin Prawiranegara tidak merasa bahwa ibu yang mengasuhnya selama ini adalah bukan ibu kandungnya (Rosidi, 2011:25-31).

Setelah besar Sjafruddin Prawiranegara dan kakaknya Siti Maria mulai mengetahui bahwa mereka mempunyai dua ibu yang sama-sama mencintainya dengan penuh kasih sayang. Sjafruddin Prawiranegara dibesarkan dalam keluarga yang taat beribadah. Pelajaran mengaji didapatkan semenjak kecil. Sjafruddin Prawiranegara adalah keturunan bangsawan di Banten ayahnya adalah seorang Pangreh Praja atau Camat di Pasauran dan jaksa di Serang, ayahnya memiliki

hubungan kekerabatan dengan Raden Aria Adipati Achmad Djajadiningrat Bupati Serang pada zaman Belanda.

Pada tahun 1924 Sjafruddin Prawiranegara dan keluarga pindah mengikuti ayahnya ke Ngawi, Jawa Timur. Ketika itu Sjafruddin Prawiranegaramasih duduk di sekolah ELS. disana segera dimasukkan lagi ke ELS “*Eorpeesche Lagere School*” melanjutkan sekolahnya di kelas tujuh. hanya beberapa bulan saja, Sjafruddin Prawiranegara merasakan perubahan kepindahannya ke Ngawi itu sebagai peristiwa yang menyadarkannya akan sifat dan kebiasaan masyarakat muslim di Banten dan yang berlainan dengan kebiasaan masyarakat di Ngawi Jawa Timur. Di Banten masa kecilnya dahulu tempat yang istimewa bagaikan negara Islam. Ngawi dan Madiun pada umumnya beragama Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari tidak nampak pengaruh Islamnya. Dibandingkan dengan masyarakat Banten sudah terbiasa menjalankan ibadah dan berlomba-lomba menjalankan rutinitas tiap harinya berbeda dengan lingkungan barunya di Ngawi (Rosidi, 2011:49-53).

Setelah lulus di ELS Sjafruddin Prawiranegara masuk ke sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Madiun. Gurunya K. de Bijh kepala sekolah ELS di Ngawi menyarankan supaya Sjafruddin Prawiranegara melanjutkan sekolahnya ke MULO karena untuk masuk MULO tidak diadakan ujian. Gurunya menambahkan bahwa dari MULO seseorang dapat juga melanjutkan ke AMS (*Algemeene Middlebare School*) Sekolah Menengah Umum setingkat SMA, menurut guru itu mutu pendidikannya sama dengan HBS. Akan tetapi Biayanya jauh lebih rendah. Dengan pertimbangan dan izin ayahnya. Akhirnya Sjafruddin Prawiranegara mendaftarkan diri ke MULO di Madiun. Lain halnya dengan adiknya Drajat Demokrat Prawiranegara melanjutkan sekolahnya ke HBS di Betawi (Jakarta) sampai lulus dan melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kedokteran sampai tamat.

Kakak perempuan Sjafruddin Prawiranegara yaitu Siti Mariah panggilan sehari-hari yaitu Tutit. Setelah menamatkan sekolah menengah umumnya, Tutit kemudian dimasukkan ke *Huishoudschool* (sekolah kepandaian putri) di Ngawi. setelah lulus, tidak lama kemudian Tutit dinikahkan dengan Ilyas Sutaarga yaitu

pada tahun 1926, Ilyas menjadi mantri polisi (satu tingkat di bawah Camat) yang berkedudukan di Banten, kemudian menjadi camat di daerah Cirebon dan menjadi Wedana di Kuningan.

Semasa hidupnya Sjafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai Redaktur siaran radio PPRK di swasta pada tahun 1939 sampai dengan 1940, Menteri Kemakmuran pada tahun 1948, ketua Korp Mubaligh Indonesia pada tahun 1948. Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada tahun 1948 sampai dengan 1949, Gubernur Bank Indonesia *de javasche bank* pada tahun 1951, Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Manajemen PPM pada tahun 1958, Pimpinan partai Masyumi pada tahun 1960, dan anggota pengurus yayasan Al-Azhar yayasan pesantren Islam pada tahun 1978.

Ketika Sjafruddin Prawiranegara menjabat sebagai gubernur bank Indonesia De Javache bank, beliau memperhatikan gerak Menteri Keuangan Jusuf Wibisono yang juga dari partai Masyumi orang yang melakukan tindakan kekeliruan yaitu membagi-bagikan kredit kepada para parlemen dalam mencari dukungan bagi kebijaksanaannya. Sjafruddin Prawiranegara telah berhenti sebagai Menteri Keuangan bersamaan dengan kawannya Mohammad Natsir dari Masyumi yaitu mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri, maka Sjafruddin Prawiranegara pun mantap berhenti. Ditambah dengan alasan dalam pengalaman kehidupan politiknya duduk berkali-kali sebagai menteri mendapatkan kesan bahwa kebanyakan politikus yang menjadi pemimpin partai tidaklah bersungguh-sungguh memikirkan kepentingan rakyatnya kebanyakan hanya bekerja untuk memikirkan kepentingan partainya atau golongannya saja.

Pada tahun 1955 dilaksanakan Pemilihan Umum yang pertama oleh kabinet Burhanuddin Harahap, untuk memilih anggota Parlemen dan memilih anggota Konstituente. Pemilihan Umum yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia setelah merdeka, berjalan dengan terbuka. Empat partai terbesar yaitu PNI (Partai Nasionalis Indonesia), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama) dan PKI (Partai Komunis Indonesia) terpilih memiliki voting suara terbanyak. Presiden Soekarno menyatakan agar dibentuk Kabinet

kaki empat yaitu terdiri dari empat partai hasil pemilihan umum itu. Namun Masyumi dan NU tidak ingin duduk dalam Kabinet yang disertai oleh partai komunis.

Kecintaan kepada Islam diwujudkan melalui aktifitasnya dalam partai Masjumi sejak partai itu didirikan dan menjabat sebagai pimpinan pusat Masyumi dilakukannya Sjafruddin Prawiranegara untuk kepentingan agama dan bangsa. di masa tuanya, Sjafruddin Prawiranegara ikut pula memajukan kehidupan bangsa dalam bidang ekonomi, Sjafruddin Prawiranegaramelihat bahwa ruang kegiatan Islam bukan hanya dalam lapangan politik. Ketika Sjafruddin Prawiranegara aktif dan menjadi pemimpin di partai Masyumi telah lama mempersiapkan Masyumi untuk berperan dalam penyelenggara Negara, ketika ibu kota Republik dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1946, beberapa tokoh Masyumi menjadi penggalang kekuatan pendukung bagi kebijakan politik. Sebagai salah satu tokoh yang tergabung di dalamnya Safruddin Prawiranegara ketika itu juga telah menjadi Sekretaris Badan Pekerja KNIP. Saat itu terjadi persaingan Partai-partai dan penyebaran fitnah yang dilakukan oleh orang Jepang yang belum terima kemenangan Indonesia dengan menunggangi kaum pemuda. Sjafruddin Prawiranegara menyampaikan sebuah gagasan yaitu *“propaganda Jepang telah melebih-lebihkan semangat sampai keluar batas dan menimbulkan kebencian dan cemoohan yang membawa pengaruh jahat terhadap rakyat”* bagi Sjafruddin Prawiranegara hal itu telah memunculkan tuntutan tidak realistis dari pemuda yang sesungguhnya berniat baik. Untuk mengingatkan tentang pengalaman pemuda yang gugur dahulu (Remy, 2013:88-98).

Pada tanggal 24 Juli 1967 Sjafruddin Prawiranegara membentuk sebuah organisasi yang bernama Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (HUSAMI). Dengan Ajaran-ajaran dan kaidah-kaidah Islam membantu dan memperkuat usaha-usaha ekonomi umat Islam Indonesia. Serta memberikan kewajiban sumbangsih bagi pembangunan ekonomi keuangan Negara dan masyarakat di Indonesia. Sjafruddin Prawiranegara sebagai seorang yang ahli ekonomi dan keuangan. Banyak ditanya oleh usahawan muslim tentang kaidah dan ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dan mendapatkan kepastian apakah bank

itu haram menurut Islam karena berdasarkan bunga. Padahal dalam kehidupan perokonomian modern fungsi bank itu sangat vital. Kemudian terbentuklah sebuah wadah untuk para usahawan muslimin yang ingin mengamalkan ajaran Islam seperti naik haji untuk mewujudkan maksud yang suci itu maka didirikan HUSAMI (Rosidi, 2011:381-382).

Pada bulan Oktober tahun 1967 Sjafruddin Prawiranegaramendirikan yayasan dana tabungan haji dan pembangunan yang bertujuan untuk membantu umat Islam supaya aman. Menunaikan ibadah haji dengan jalan menabung dan melaksanakan pengurus penabungan yang menjamin keberangkatan para peserta tabungan untuk menunaikan Rukun Islam yang ke lima yaitu ibadah haji.

4.2 Peran Sjafruddin Sebagai Anggota BP KNIP Tahun 1945

Pasca diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tatanan mengenai kehidupan kenegaraan dan perlengkapan sebuah Negara merdeka segera dibutuhkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Pancasila sebagai Dasar Negara, lembaga *eksekutif* dipilih. Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden. Kabinet pun dibentuk berupa kabinet Presidensial sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pada 19 Agustus 1945 ditetapkan bahwa adanya 12 Kementerian Negara dan wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan (Raliby, 1953: 14-15).

Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bermarkas di Jakarta. Mulai tanggal 5 Oktober BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang nantinya pada 7 Januari 1946 TKR berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan pada 25 Januari 1946 Tentara Keselamatan Rakyat diganti menjadi Tentara Republik Indonesia. Sejak 3 Juni 1947 ditetapkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia yang merupakan gabungan dari laskar laskar dengan Tentara Republik Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan yang sebelumnya bertindak sebagai penasihat presiden dibubarkan

dan sebagai gantinya dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Presiden dan Wakil Presiden melantik 135 orang. KNIP kemudian mengangkat salah seorang anggotanya yang berasal dari tiap daerah untuk mendirikan Komite Nasional Indonesia di daerah, yang bertugas membantu gubernur masing-masing provinsi (Poespaonagoro & Notosusanto, 1993: 145-146).

Pembentukan Komite Nasional Indonesia daerah Karesidenan Priangan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 1945. Pengurus yang terbentuk ialah, Niti Sumantri sebagai ketua, Ir. Oekar Bratakoesoemah sebagai Wakil Ketua, Anwar Sutan Pamuntjak dan Hamdani sebagai anggota. Dibentuk juga sekretariat yang pimpinannya diserahkan pada Sjafruddin. Dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Indonesia daerah Priangan di Bandung, tidak hanya membahas persoalan setempat saja. Para anggota Komite Nasional Indonesia daerah Karesidenan Priangan sering mendiskusikan masalah yang bersifat nasional, untuk membantu pemerintah pusat dengan usul dan saran yang bermanfaat. Salah satu hasil pertemuan itu lahirlah usul agar pemerintah mengeluarkan uang Republik Indonesia sendiri, menggantikan uang Jepang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Usul tentang pembuatan uang Republik Indonesia akan disampaikan kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta (Rosidi, 2011: 99-102).

Sjafruddin bersama Oekar Bratakoesoemah menemui Mohamad Hatta dan menyampaikan tentang perlunya membuat uang Republik. Mohamad Hatta memandang tidak perlu membuat uang sendiri karena khawatir kalau dituduh memalsukan uang oleh dunia internasional. Menurut Hatta, dilanjutkan saja pemakaian uang yang dicetak Jepang tanpa membuang waktu dan tenaga untuk mengeluarkan uang baru. Sebagai contoh pemerintahan Bolsyewik di Rusia tetap menggunakan uang pemerintahan Tsar yang berhasil digulingkan pada tahun 1917. Pemerintah komunis tidak mengeluarkan uang baru, tetapi memakai uang lama. Sjafruddin berusaha meyakinkan Wakil Presiden dengan memberikan pendapat bahwa contoh dari Rusia itu tidak berlaku bagi Indonesia. Pemerintah Bolsyewik tidak mendirikan negara baru, hanya pemerintahannya yang ditukar. Di Indonesia tidak hanya menukar pemerintahan Belanda dengan pemerintahan

Indonesia, tetapi status jajahan ditukar dengan status negara yang merdeka dan berdaulat. Maka perlu adanya uang baru sebagai salah satu atribut kemerdekaan (Prawiranegara, 1972: 323).

Pada awal bulan Oktober 1945 beberapa anggota KNIP mengemukakan saran untuk mengubah sistem pemerintahan Presidensial menjadi system Parlementer dengan kekuasaan legislatif berada ditangan KNIP. KNIP tidak hanya sebagai penasihat presiden, melainkan sebagai lembaga legislatif kepada siapa kabinet harus bertanggungjawab. Ditetapkan bahwa KNIP akan membentuk Badan Pekerja yang akan bertugas sebagai wakil pleno yang sulit bersidang lengkap karena anggota-anggotanya bertebaran diseluruh tanah air sedangkan perhubungan saat itu sangat sulit (Rosidi, 2011: 107). Dalam rapat Pleno KNIP pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, dibentuklah Badan Pekerja dengan Sutan Sjahrir sebagai ketua dan Amir Sjarifudin sebagai wakil. Seluruh Badan Pekerja terdiri atas 1 orang teramsuk ketua dan wakil ketua. Adapun kelima belas anggota Badan Pekerja itu ialah: Sutan Sjahrir (ketua), Amir Sjarifudin (wakil ketua), Mr. Suwandi, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Wachid Hasjim, Mr. R. Hindromartono, Mr. R. M. Sunaria Kolopaking, Dr. A. Halim, Subadio Sastrosatomo, Tan Ling Djie, Supeno, S. Mangunsarkoro, Adam Malik, Tadjaludin, dan Dr. Sudarsono (Koesnadi Prodjo, 1951: 141).

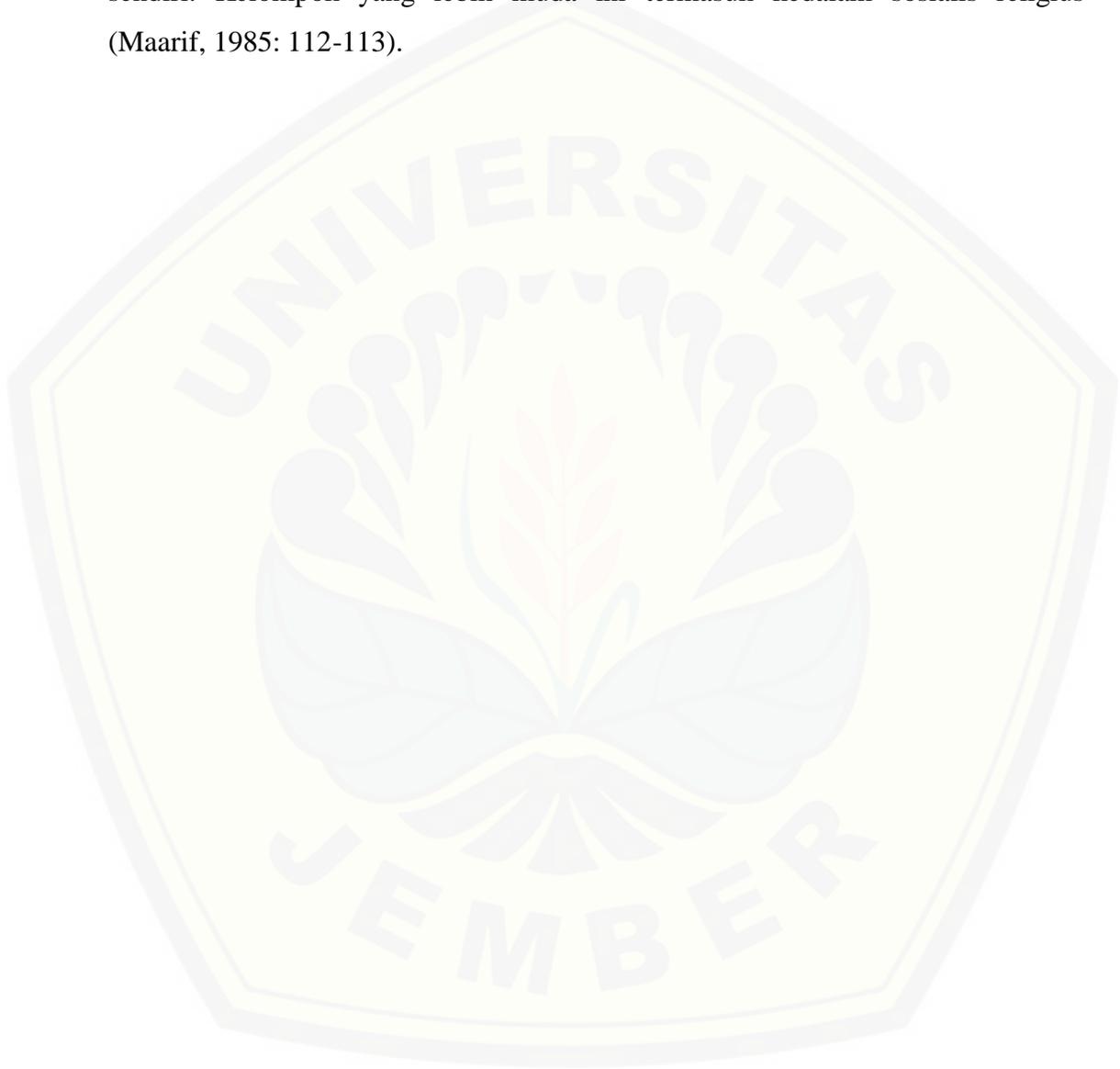
Hasil pertama Badan Pekerja KNIP ialah sebuah rancangan undang-undang tentang pembentukan KNI di daerah-daerah dan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer dengan banyak partai. Tentang pembentukan partai-partai dibuat maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden, terkenal sebagai Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 3 November 1945, mengenai anjuran Pemerintah tentang pembentukan Partai Politik. Pembentukan partai-partai ini untuk memperlihatkan kepada luar negeri bahwa Indonesia benar-benar menjunjung demokrasi dengan menciptakan system multi partai. Sebab ada kekuatiran dari kalangan kaum intelektual khususnya Sjahrir dan pengikut-pengikutnya bahwa jika hanya satu partai politik saja, nanti akan dipandang sebagai negara totaliter buatan Jepang (Rosidi, 1986:256).

Pendirian Partai-Partai politik ini bertujuan memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur. Pemerintah berharap supaya partai-partai tersusun sebelum pelaksanaan Pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946 (Koesnadi Prodjo, 1951: 76).

Dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik, maka setiap anggota KNIP harus memilih dan masuk kedalam salah satu partai. Pembentukan partai politik ini menimbulkan kebingungan dalam diri Sjafruddin, akan memilih partai Sosialis atau Masyumi. Sutan Sjahrir bersama kelompoknya mencalonkan Sjafruddin sebagai anggota Badan Pekerja KNIP atas dasar keyakinan yang sepaham, dan setelah pembentukan partai wajar jika mengharapkan Sjafruddin masuk dalam partai yang dibentuk Sjahrir, yakni Partai Sosialis. Tetapi Sjafruddin pun sadar sebagai muslim, akan keluarganya yang taat menjalankan syariat, ayahnya yang rajin beribadah dan meninggal pada saat sedang berpidato sambil mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. Sepantasnya Sjafruddin masuk Masyumi. Tetapi jika masuk Masyumi, akan mengecewakan orang-orang yang sudah menaruh simpati dan kepercayaan padanya. Jika menjadi anggota Partai Sosialis, Sjafruddin merasa mengkhianati ayahnya (Rosidi, 2011: 110-111). Rasa cinta kepada orang tuanya terutama kepada ayahnya sebagai muslim yang saleh, maka pilihannya jatuh pada Masjumi. Sadar akan kekurangan pengetahuan tentang Islam, Sjafruddin berjanji akan memperbaiki kelemahan-kelemahan itu dengan mempelajari Bahasa Arab (Rosidi, 1986: 256).

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dibentuk pada tanggal 7 November 1945 (Raliby, 1953: 84) yang meliputi praktis semua organisasi-organisasi Islam yang berarti kecuali Perti yang organisasi dan pengaruhnya terutama di Sumatera Barat. Masyumi secara organisasi adalah sebuah badan federasi, di dalamnya terdapat anggota biasa (perorangan), dan anggota luar biasa (kolektif), seperti Muhammadiyah dan NU. Sjafruddin masuk Masyumi melalui perorangan. Dalam Dewan eksekutif yang umumnya terdiri dari kelompok

modernis terdapat dua atau tiga kelompok yang mempunyai orientasi ideologi politik yang sedikit berbeda. Menurut Abu Hanifah kelompok pemikir terdiri dari pemimpin-pemimpin intelektual muslim yang lebih muda seperti Sjafruddin Prawiranegara, Mohamad Roem, Kasman, Jusuf Wibisono dan Abu Hanifah sendiri. Kelompok yang lebih muda ini termasuk kedalam sosialis religius (Maarif, 1985: 112-113).



BAB 5. PERAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI MENTERI KEUANGAN DAN KEMAKMURAN TAHUN 1946-1949

Sjafruddin Prawiranegara terpilih menjadi anggota KNIP (Komite Nasionalis Indonesia Pusat) oleh Sutan Syahrir di Bandung pada bulan November 1945. KNIP adalah badan pekerja yang akan bertugas sebagai mengeluarkan pleno sebuah rancangan undang-undang tentang perubahan sistem pemerintah presidential menjadi system parlementer berupa penyaringan Partai, Tentang pembentukan partai-partai yang ditandatangani oleh wakil presiden Maklumat wakil presiden nomor X tanggal 3 November 1945, pada saat itu Sjafruddin Prawiranegara memilih partai Masyumi (Rosidi, 2011:109-111).

Ketika Sjafruddin Prawiranegara menjadi Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mencetuskan gagasan tentang pencetakan Uang Republik Indonesia, pada saat itu uang di Indonesia masih menggunakan uang lama yaitu mata uang Belanda £ (gulden) dan Jepang ¥ (yen). Tujuan terwujudnya Uang Republik Indonesia dapat menjadi alat perjuangan yang ampuh dalam mencerminkan eksistensi Negara Republik Indonesia yang berdaulat yang artinya untuk membiayai atau menggaji pegawai negeri dan tentara, membeli perlengkapan administrasi pemerintah dan lain-lain.

Pada tahun 1949 pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-undang Darurat tentang pinjaman darurat yang memberi kuasa kepada Menteri Keuangan. Kemudian populer dengan istilah gunting uang atau gunting Syafruddin artinya uang kertas pecahan senilai Rp 5 keatas dipotong menjadi dua.

Sjafruddin Prawiranegara telah menghasilkan karya tulis dalam bidang Ilmu Agama, Ekonomi dan Politik berbentuk brosur dan artikel. Sejak tahun 1946-1985 Sjafruddin Prawiranegaramenghasilkan kurang lebih 86 buah buku, antara lain Tinjauan Tentang Politik Ekonomi Dan Keuangan, Peranan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Politik, Ekonomi dan Keuangan, Pedoman Untuk Menjalankan Dakwah Islamiyah di Indonesia. Sjafruddin Prawiranegara juga aktif dalam bidah dakwah ceramah dan berpidato, baik siar Islam maupun pemerintahan. Sjafruddin Prawiranegara mendapatkan pekerjaan sejak hari rabu

tanggal 14 Juli 1951 (Noer, 2004:109-110). Sjafruddin Prawiranegara memulai pekerjaannya menjabat sebagai Gubernur *Javasche Bank*, yang sebelumnya adalah Dr. Houwink. Ini adalah jabatan Sjafruddin Prawiranegara sebagai gubernur Bang Indonesia yang pertama saat Republik Indonesia.

Dari pengalamannya sebagai anggota partai Masyumi Sjafruddin Prawiranegara terus bersemangat menyiarkan agama Islam. Baginya manusia yang mulia di mata Allah SWT, adalah Muslim yang taat menyampaikan amalan dan kebaikan pada muslim lainnya. Pada tanggal 24 Juli 1967 Sjafruddin Prawiranegara membentuk sebuah organisasi yang bernama Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (HUSAMI) yang mengedepankan ajaran-ajaran dan kaidah Islam di lapangan ekonomi umat Islam Indonesia, memberikan darma dan sumbangan bagi pembangunan ekonomi keuangan masyarakat dan negara Indonesia.

Tujuan HUSAMI diantaranya sebagai Yayasan Dana Tabungan Haji dan dana pembangunan yang bertujuan untuk membantu umat Islam supaya aman. Menunaikan ibadah haji dengan menabung, pengurus penabungan melaksanakan demi menjamin keberangkatan para peserta tabungan untuk ibadah haji, akan tetapi pemerintah pada saat itu tidak mengabdikan penyelenggaraan HUSAMI. Di Banten adik Sjafruddin Prawiranegara yang bernama Dr. Drajat Demokrat Prawiranegara namanya digunakan sebagai nama sebuah Rumah Sakit Umum Darurat di Serang disamping Alun-alun Serang. Dr. Derajat Prawiranegara. Pada saat itu anak muda di Banten yang memiliki semangat dan intelektual tinggi masih bisa dihitung jari karena pada saat itu dari belum ada masyarakat yang mendapat gelar Profesor. Akan tetapi, Sjafruddin Prawiranegara dan Drajat Prawiranegara mampu mengharumkan tanah kelahirannya di Banten. Bagi keluarga Sjafruddin Prawiranegara ini adalah sebuah kebanggaan dan contoh yang baik. Sjafrudin lulusan Sarjana Hukum dan beberapa kali menjadi menteri. Dan banyak bekerja dalam keuangan Negara kemudian menjadi seorang pemikir yang penting dalam pemerintahan, begitu juga Prof.Dr. Drajat Demokrat Prawiranegara yang seorang dokter terkenal yang ahli dalam medis kemudian menjadi Menteri Kesehatan.

Sjafruddin Prawiranegara adalah seorang ahli hukum yang jujur, jujurnya bukan hanya kepada agama akan tetapi kepada Undang-Undang Dasar, sehingga beliau berani menentang pemerintahan yang kacau ketika itu. Beliau mengasingkan diri dan memisahkan dari pemerintahan pusat untuk merancang strategi kekuatan melawan komunis. Sjafruddin Prawiranegara disebut oleh masyarakat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Jadi apabila Presiden saat ini Presiden Joko Widodo adalah presiden ketujuh, maka masyarakat sebagian menyebutnya sebagai presiden ke delapan. Karena pada Agresi Militer Belanda II menyerang Indonesia, Presiden Sukarno dan Moh. Hatta ditangkap oleh Belanda. yang memegang kepemimpinan sementara itu adalah Sjafruddin Prawiranegara dengan dibantu beberapa tokoh-tokoh lainnya yang mendukung mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI. Hanya saja ketika Presiden Soekarno dan Wakil presiden Mohammad Hatta sedang di tahan setelah situasi normal dikembalikan mandatnya kembali kepada presiden Soekarno.

Masyarakat yang masih ada ikatan keluarga dengan Sjafruddin Prawiranegara yang pernah mengunjungi rumah kediaman beliau menceritakan bahwa rumahnya Mr. Sjafruddin Prawiranegara sangat istimewa, rumahnya megah dan bersih. Syafruddin memperlakukan tamunya dengan baik dan sopan, beliau adalah tipe orang yang merakyat.

Syafrudin Prawiranegara membuktikan kepeduliannya kepada Negara mengenai masyarakat yang mendapat upah minim yang tidak sesuai. Dalam risalahnya yang dibuat dalam surat kabar Berita Masyumi pada tanggal 12 Juni 1951 tentang “pemerintah harus selekasnya mengadakan seleksi dan rasionalisasi dalam alat-alat pemerintahan, yang berisikan kebutuhan negara yang sudah merdeka, Sjafruddin Prawiranegara mengharapkan kebijaksanaan pemerintah agar selekasnya mengganti peraturan gaji, dengan peraturan baru yang lebih pantas dalam pembagian golongan-golongan menurut skala-skala yang lebih banyak. Dan memberi penghargaan yang lebih tinggi kepada pegawai yang memiliki keahlian dan kepemimpinan.

Pada 20 Januari 1951 ketika adanya isu Darul Islam terkait wacana dalam sebuah artikel berjudul “Darul Islam Kartosuwirjo” negara Islam. Kartosuwirjo

pemimpin Darul Islam yang dikaitkan pemberontakan ini dengan Masyumi. Sjafruddin Prawiranegar asebagai tokoh Masyumi membuat artikel bernada pembelaan (Noer, 2004:73-74). Masyumi menyepakati untuk menarik garis pemisah yang lebih tegas dengan para Pemberintah, partai Masyumi ,mengumumkan sebuah deklarasi yang isinya di ulang-ulang demi menghilahkan kerancuan, dan keyakinan masyarakat yang membacanya:

- a) Meskipun dari pihak Masyumi telah kerap kali diterangkan perbedaan pendirian politik antara Masyumi dan gerakan Darul Islam, tetapi bagi banyak orang pendirian itu belum jelas benar.
- b) Antara lain bagi alat-alat pemerintah kita terutama kalangan bawahan, belum begitu jelas perbedaan pendirian itu.
- c) Berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dewan pimpinan partai menganggap perlu untuk mengumumkan penjelasan yang tegas tentang perbedaan pendirian politik antara Masyumi dan gerakan Darul-Islam
- d) Masyumi hendak mencapai maksudnya melalui jalan demokratis-parlementer, melalui jalan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan semua Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- e) Dengan pengumuman ini, mudah-mudahan menjadi tambah jelas perbedaan antara pendirian Masyumi dan gerakan Darul Islam bagi Umum (Rosidi, 2011:225-230).

Upaya yang dilakukan Sjafruddin Prawiranegara kepada Negara dan Organisasinya mencerminkan Sjafruddin Prawiranegara bertanggung jawab dan melibatkan diri dengan turunnya kepodim untuk berpidato dan menggagaskan pemiikiran maju dan luwes. Sjafrudddin Prwiranegara berdiri diantara peraturan Undang-undang tidak melanggar norma-norma Islam dan institusi negara. Dalam muktamar Masyumi bulan Desember 1956 Sjafruddin Prawiranegara mengutarakan perasaannya, diantaranya berkata

“Ekonomi nasional itu barulah dapat dibenarkan untuk dijadikan politik pemerintah nasional apabila tujuannya bukan semata-mata menggantikan pengusaha asing dengan pengusaha bangsa kita.

Peralihan ekonomi kolonial kepada ekonomi nasional itu harus diartikan sebagai peralihan dan susunan ekonomi yang hanya mementingkan golongan yang berkuasa. Tanpa mementingkan seluruh masyarakat. Tiap-tiap rencana pembangunan menurut perhitungan tidak dapat dilaksanakan dan membawa hasil yang diharapkan kalau tidak terlebih dahulu diadakan perubahan rohaniah yang radikal pada bangsa kita, terutama pada pemimpinnya”.

Sjafruddin Prawiranegara yang masih sebagai anggota pimpinan partai Masyumi menyaksikan peristiwa tindakan Presiden Soekarno menunjuk dirinya sebagai warga negara biasa menjasi formatur dan pembentukan Dewan Nasional sebagai lembaga yang tidak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara yang pada waktu itu berlaku pada pendapatnya dan terang terangan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Maka jelas bagi Sjafruddin Prawiranegara tindakan Presiden Soekarno menyalahi bunyi Undang-Undang Dasar Sementara. Pada bulan Februari 1957 presiden menyatakan bahwa “*Freedom From Want* adalah lebih penting dari pada *Freedom of Expression*” dalam pidato di Solo yang mengatakan bahwa konstitusi itu dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk konstitusi.

Konsepsi presiden Soekarno menimbulkan kontroversi. Partai-partai agama baik agam Islam maupun bukan seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik. Pada bulan Mei 1957 Sjafruddin Prawiranegara diminta memberikan ceramah oleh Himpunan Mahasiswa Katolik di Jakarta. Ceramah itu memberikan penilaian terhadap situasi kemelut tanah air yang sedang dihadaapi bangsanya dan memberi penilaian terhadap sikap beberapa orang pemimpin. Sjafruddin Prawiranegara menyatakan sikapnya sebagai seorang pemimpin Islam dalam hubungannya dengan masyarakat dan politik (Rosidi, 2011:299).

5.1 Peran Sjafruddin Sebagai Menteri Keuangan Tahun 1946

Pada kabinet pertama setelah sistem pemerintahan menjadi Parlementer, Sjahrir ditunjuk sebagai formatur kabinet pada tanggal 14 November 1945 (Ricklefs, 1991: 327). Sjahrir mencari Mentri Keuangan dan ditawarkan pada Sjafruddin, namum ditolak. Sjafruddin merasa belum pantas untuk memikul tanggungjawab sebesar itu, belum cukup pengalaman dalam keuangan, dan tidak

pernah berkecimpung dalam politik (Thee Kian Wie, (ed), 2005:41). Sjahrir menyerahkan mandatnya pada Presiden pada bulan Februari 1946 karena tidak mendapat kepercayaan dari KNIP (Rosidi, 2011: 113). Presiden menerima penyerahan itu, namun untuk kedua kalinya Sjahrir ditunjuk sebagai formatur. Dalam kabinet Sjahrir ke-2 yang dibentuk pada tanggal 12 Maret 1946, Sjafruddin duduk sebagai Menteri Muda Keuangan. Pada tanggal 2 Oktober 1946 Kabinet Sjahrir III dilantik. Pada Kabinet Sjahrir III ini Sjafruddin duduk sebagai Menteri Keuangan (Raliby, 1953:419).

Wakil presiden menyetujui gagasan yang dikemukakan delegasi dari Bandung untuk membuat uang Republik Indonesia yang baru menggantikan uang Jepang, maka masalah itu secara teknis selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis, pada tanggal 7 November 1945 membentuk suatu panitia yang dinamakan Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh T. R. B. Sabaruddin, Direktur Bank Rakyat Indonesia. Tugasnya ialah menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pencetakan uang. Ketika ditawarkan untuk menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir III, Sjafruddin menyatakan kesediannya. Salah satu faktornya ialah karena Sjafruddin ingin segera mempercepat proses pencetakan "*Oeang Republik Indonesia*" (ORI). Sjafruddin yakin bahwa terwujudnya ORI dapat menjadi alat perjuangan yang ampuh dalam mencerminkan eksistensi negara Republik Indonesia yang berdaulat dan besar pula artinya untuk membiayai perjuangan seperti menggaji pegawai negeri dan tentara, membeli perlengkapan administrasi pemerintah dan lain-lain. Keluarnya ORI bukanlah tujuan utama. Tujuan ini baru akan tercapai apabila ditempuh dengan kerja keras yang ditinjau dari sudut ekonomi berarti meningkatkan produksi, bukan dengan mencetak uang (Rosidi, 2011: 127-137).

Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia menghadapi kesulitan dan rintangan. Pencetakan ORI menggunakan alat yang harus dicari di dalam negeri. Tidak mungkin mendatangkan mesin pentjetak uang dari luar negeri melihat kondisi saat itu. Kesukaran memperoleh bahan-bahan baku yang diperlukan seperti kertas, tinta, bahan kimia untuk fotografi dan *zinkografi*, pelat seng untuk klise dan alat-

alat lainnya seperti mesin aduk untuk membuat tinta. Pembuatan klise dikerjakan di percetakan de Unie dan percetakan Balai Pustaka. Pembuatan gambar *lithografi* dilakukan di percetakan de Unie. Percetakan perdana dilakukan di percetakan Balai Pustaka dengan pertama-pertama mencetak lembaran uang seratus rupiah (Rosidi, 2011: 129).

Terjadinya pertempuran Surabaya November 1945 dan kondisi politik Indonesia saat itu menyebabkan pencetakan uang yang beberapa bulan dilaksanakan di Jakarta dipindahkan ke pedalaman dengan alat yang serba kurang lengkap (*Sikap*, 24 Maret 1949).

Pihak Inggris yang pro Belanda memberikan pendapat tentang rencana pemerintah mengeluarkan uang sendiri, bahwa lebih baik menerima uang Hindia Belanda karena mempunyai kurs internasional, dan dapat dipergunakan untuk membayar keluar negeri. Ditambahkan, kalau pemerintah RI mengeluarkan uang sendiri, uang itu tidak laku di luar negeri. Pada kenyataannya uang NICA sekalipun mempunyai kurs internasional tidak diterima dan ditolak oleh rakyat. Uang Jepang ditarik, sebagai gantinya, ORI yang diterima penuh kepercayaan oleh rakyat. Penolakan terhadap uang Belanda merupakan suatu bukti nya bahwa selain ORI uang lain sudah tidak dapat dijadikan alat penukar. Oleh karena itu, tidak perlu uang yang memiliki kurs luar negeri, yang dibutuhkan adalah uang yang diterima rakyat (*Kedaulatan Rakyat*, 26 Desember 1945).

Pada tanggal 29 sampai 30 Oktober 1946 uang yang dibuat sendiri oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan secara resmi sebagai alat penukaran, alat pembayaran yang sah, dan alat pengukur harga di seluruh wilayah yang secara *de facto* berada dibawah kekuasaan negara Republik Indonesia, yaitu Jawa, Madura dan Sumatra. Sebelum ORI dikeluarkan, pemerintah terlebih dahulu menarik semua uang Jepang dan uang Hindia Belanda dari peredaran dengan cara yang sedikit sekali menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menggantinya dengan uang baru, yang mempunyai harga tinggi serta dapat diawasi peredarannya (*Sikap*, 12 Maret 1949).

Langkah pertama dimulai tanggal 22 Juni 1946 pemerintah Republik Indonesia melarang orang Indonesia membawa uang lebih dari *f* 1.000 dari

daerah Karesidenan Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor dan Priangan ke daerah-daerah lain di Jawa dan Madura tanpa izin lebih dahulu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Demikian juga dilarang membawa uang dari luar masuk ke pulau Jawa dan Madura melebihi f 5.000 uang Jepang tanpa seijin Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Mulai tanggal 15 Juli 1946 di Jawa dan Madura, seluruh uang Jepang dan uang Hindia Belanda yang ada di tangan masyarakat, perusahaan-perusahaan dan badan-badan lain harus disimpan pada bank-bank yang ditunjuk, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Surakarta, Bank Nasional, Bank Tabungan Pos dan Rumah Gadai (Beng To, 1991: 76-77).

Pengeluaran ORI didasarkan atas dua undang-undang yaitu pertama Undang-Undang no. 17/1946 tertanggal 1 Oktober 1946 yang berisi pemerintah akan mengeluarkan uang sendiri yakni Uang Republik Indonesia, sedangkan tentang bentuk, warna, harga uang tersebut dan lain-lain yang berhubungan dengan pengeluaran uang itu pengaturannya diserahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kedua Undang-Undang no 19/1946 yang diumumkan tanggal 24 Oktober 1946 disebut sebagai Undang-Undang tentang pengeluaran Uang Republik Indonesia, mengatur dasar nilai uang baru dengan uang Jepang, tentang pembayaran hutang lama yang belum lunas pada waktu berlakunya ORI, tentang uang Jepang yang masih berlaku sekarang, dan pengaturan harga-harga maksimum bagi barang-barang yang dipandang perlu yang penetapannya diserahkan kepada Menteri Kemakmuran. Dasar nilai ditentukan 10 rupiah ORI sama dengan emas murni seberat 5 gram. Emas murni yang dimaksud dalam pasal ini yaitu emas 24 karat. Sebagai dasar penukaran 50 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI untuk wilayah Jawa dan Madura serta 100 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI untuk wilayah Sumatera.

ORI berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada tanggal 29 malam 30 Oktober 1946 jam 24.00. Pada saat itu juga menurut putusan tersebut ORI menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di daerah Republik di Jawa dan Madura. Di Sumatera, peredaran ORI, karena kesukaran-kesukaran dalam lapangan tehnik (kesulitan mengadakan pengangkutan dan menjamin

keamanannya) tidak dapat diadakan dengan segera. Di Sumatera uang Jepang masih terus berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, di samping uang sementara (Uang Republik Indonesia untuk provinsi Sumatera) sampai kira-kira pertengahan tahun 1948 (*Sikap*, 12 Maret 1949).

Pada awal penyebarannya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19/1946 yang memuat tentang pembagian uang sebesar 1 rupiah ORI pada setiap orang, dan ditambah 3 sen untuk tiap kepala keluarga. Uang itu dimaksudkan sebagai modal untuk setiap orang. Adapun pertimbangan pemerintah mengenai jumlah uang 1 rupiah tersebut adalah dengan dasar bahwa pada saat itu setiap orang mempunyai uang tunai sebesar 50 rupiah uang Pendudukan Jepang, yang sebelumnya sudah diputuskan. Pembagian uang dilakukan secara serentak pada hari dan waktu yang bersamaan di seluruh Jawa dan Madura. Pembagian uang baru diberikan langsung kepada masyarakat secara merata sebagai imbalan atas uang lama yang tidak berlaku lagi, dan juga agar masyarakat tidak dirugikan (Nurhajarini, 2006: 36).

Pada tanggal 29 Oktober 1946 malam, sebelum keluarnya ORI, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara menyampaikan pidato melalui RRI. Dalam pidato itu disampaikan pemberitahuan tentang keluarnya dan diresmikannya ORI pada pagi hari tanggal 29 Oktober 1946 sebagai alat pembayaran yang sah. Sjafruddin Prawiranegara selaku Menteri Keuangan menyampaikan pesan guna mengurangi keguncangan ekonomi dengan keluarnya ORI tersebut. Isi pesan Sjafruddin antara lain mengajak rakyat untuk berhemat, bagi perusahaan-perusahaan terutama toko-toko, warung-warung jangan menjual barang terlalu banyak untuk keperluan sehari-hari dan jangan menutup toko, pembeli dibatasi, toko-toko dan warung-warung diberi kesempatan untuk menyimpan uangnya di bank-bank sampai tanggal 30 Oktober 1946, memberi kelebihan persediaan makanan kepada tetangga yang kekurangan, jangan pergi ke bank untuk jumlah kecil untuk mencari untung, tetapi harus berani menderita kerugian (Prawiranegara, 2011: 32).

ORI tidak dapat diedarkan di Sumatra, maka untuk mengatasi kesulitan keuangan, pada akhir tahun 1947 beberapa daerah di Sumatra mengeluarkan jenis

uang sendiri. Diantaranya, ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Sumatra), URISU (Oeang Repoeblik Indonesia Sumatra Utara), URIDJA (Oeang Repoeblik Indonesia daerah Djambi), URIDA (Oeang Repoeblik Indonesia daerah Aceh), ORITA (Oeang Repoeblik Indonesia daerah Tapanuli), dan Uang Mandat yang dikeluarkan oleh Dewan Perahanan daerah sumatra Selatan. Bahkan daerah Banten yang terisolasi, dikeluarkan URIDAB (Oeang Repoeblik Indonesia daerah Banten) (Beng To, 1991: 71).

Di wilayah Indonesia tidak hanya ada satu jenis uang. Pihak NICA (Belanda) mengeluarkan uang baru sendiri yang dinamakan uang NICA. Peredaran uang NICA bersamaan dengan ORI telah menimbulkan kesukaran bagi rakyat, khususnya penduduk daerah perbatasan anantara daerah yang dikuasai Belanda dan daerah yang dikuasai Republik. Pada satu pihak penduduk takut diketahui memiliki ORI oleh tentara NICA, dipihak lain takut pula diketahui memiliki uang NICA oleh pasukan Republik. Ternyata makin lama uang Republik makin populer dikalangan rakyat (Rosidi, 2011: 141).

ORI dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah menjalankan peranan sebagai alat yang mempersatukan bangsa Indonesia untuk bersama-sama dengan pemerintah Republik yang masih muda itu berjuang mempertahankan dan menegakkan negara Indonesia. Dengan kata lain ORI telah berperan sebagai alat perjuangan kemerdekaan, baik dalam menghimpun tenaga maupun dalam membiayai berbagai macam keperluan negara. ORI berfungsi juga sebagai alat revolusi yang mendukung dan memungkinkan pemerintah Indonesia mengatur administrasinya, mengorganisasi dan memperkuat tentaranya, memelihara keamanan dan ketertiban, mengurus kesejahteraan rakyat dalam menentang agresi Belanda (Beng To, 1991: 69-84).

ORI telah berfungsi tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah, alat penukaran, alat pengukur harga, alat pembayaran yang mempunyai tenaga pembeli jauh lebih besar dari uang Jepang yang baru saja dicabut dari peredaran di daerah Republik Indonesia, melainkan ORI adalah Uang Republik Indonesia. Negara baru dengan segala cita-cita dan semangat yang terkandung didalamnya. Belum pernah dalam sejarahnya rakyat Indonesia mengalami uang yang memuat

gambar seorang dari bangsanya sendiri sebagai kepala negara (Sikap, 31 Maret 1949).

5.1.1 Peran Sjafruddin Sebagai Menteri Keuangan Kedua Tahun 1949

Delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta. Pokok-pokok yang penting dari hasil Konferensi Meja Bundar ialah bahwa pemerintah Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk oleh Negara Republik Indonesia dengan negara-negara bagian yang sudah ada. Dalam bidang ekonomi-keuangan ada beban yang harus dipikul oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk, yaitu pembayaran utang-utang pemerintah Hindia Belanda sampai tahun 1949. Termasuk di dalamnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan militer yang memerangi Republik Indonesia (Kahin, 1995: 549-557).

Pada tanggal 16 Desember 1949 dilakukan pemilihan presiden RIS yang pertama oleh wakil-wakil negara bagian dan wakil Republik Indonesia. Ir. Soekarno terpilih secara bulat sebagai presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama. Pada tanggal 21 Desember 1949, Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri mengumumkan kabinetnya, yang merupakan kabinet pertama bagi Republik Indonesia Serikat (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 205). Di dalam kabinet Republik Indonesia Serikat, Sjafruddin Prawiranegara duduk sebagai Menteri Keuangan (Kahin, 1995: 569). Tugas Menteri Keuangan, termasuk dalam program kabinet RIS yang pertama itu nomor 4, yaitu: berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan; mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya (Rosidi, 2011: 244).

Banyak kesulitan dalam bidang keuangan yang dihadapi oleh pemerintah yang baru itu, yang harus segera diselesaikan. Mata uang yang beredar dalam

masyarakat bermacam-macam; ada uang NICA atau secara populer disebut “uang merah” ada ORI (di daerah) dan bermacam uang Republik lain yang berlaku di wilayahnya sendiri-sendiri. Uang itu semuanya harus diganti dengan uang baru yang berlaku di seluruh Indonesia. Tetapi masalahnya bukan semata-mata mengganti uang, karena segala macam uang itu mengalami inflasi yang tingkatnya tinggi. Penukaran dengan uang baru menimbulkan masalah praktis pula seperti penentuan kurs dari macam-macam uang itu terhadap uang baru, yang menyangkut pula utang-piutang dan lain-lain. Neraca perdagangan dari tahun ketahun yang memperlihatkan defisit yang kian membengkak. Ini menyebabkan cadangan devisa dan emas di bank kian menyusut. Disamping itu pemerintah Republik Indonesia Serikat menerima beban utang pemerintah Hindia Belanda, baik utang dalam maupun luar negeri (Beng To, 1991:116).

Semua masalah yang bertimbun itu merupakan tantangan buat Sjafruddin sebagai Menteri Keuangan. Suatu tindakan drastis harus dilakukan. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi ialah karena produksi yang rendah, karena banyaknya mesin yang rusak, perkebunan yang tidak terpelihara, jalan yang tidak dapat dilalui, transportasi yang buruk, pegawai yang terlalu banyak ditambah pula oleh adanya masalah kepegawaian kembar, penyelundupan, dan lain-lain. Bagi Menteri Keuangan RIS tidak dibatasinya kebebasan dalam langkah-langkah persetujuan KMB dalam bidang keuangan telah mengikat langkah-langkahnya. Seperti penentuan langkah-langkah kebijaksanaan devisa, bahkan pengangkatan Presiden dan para direktur Bank Sirkulasi itu pun hanya dapat dilakukan setelah mengadakan perundingan dengan Belanda. Begitu pula lalu lintas pembayaran antara Indonesia dengan negara-negara luar hampir seluruhnya harus disalurkan melalui negeri Belanda (Parera,ed., 2005: 27).

Pada tanggal 11 Maret 1950 dikeluarkanlah peraturan oleh Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (yang mulai berlaku tanggal 13 Maret 1950) untuk memperbaiki perkembangan neraca pembayaran dengan memakai system Sertifikat Devisa. Tanpa melakukan perubahan kurs resmi rupiah terhadap mata uang asing, peraturan itu menetapkan kurs efektif bagi pembelian dan penjualan devisa yang berbeda. Orang-orang yang mengekspor barang dari Indonesia, selain

memperoleh uang sebanyak harga barang-barangnya dalam rupiah Indonesia, juga memperoleh Sertifikat Devisa sebesar 50% dari harga barang yang diekspornya itu (Beng To, 1991:200-201).

Setiap orang yang hendak mengimpor barang, selain harus mempunyai ijin untuk memperoleh devisa, juga harus mempunyai Sertifikat Devisa yang besarnya sama dengan harga barang yang hendak diimpornya. Maksud peraturan ini adalah hendak menggiatkan ekspor dan menekan impor. Timbul reaksi yang bermacam-macam terhadap peraturan baru. Di samping yang menggerutu (kebanyakan importir pendatang baru yang tidak mempunyai modal yang cukup kuat), banyak menyambut dengan antusias, karena menganggap peraturan baru ini akan mendorong ekspor dan memberikan perangsang kepada penghasil bahan ekspor yang kebanyakan petani kecil (Rosidi, 2011: 248-249).

Akibat dari peraturan Devisa yang baru ini antara lain, apabila ekspor meningkat maka akan terjadi lebih banyak lagi alat-alat pembayaran asing guna pembelian di luar negeri; Kurs rupiah Indonesia sesudah beberapa lama akan tetap pada tingkat yang semestinya; adanya sistem baru ini, perdagangan gelap akan kurang menarik; dan dengan penyehatan peredaran uang ini, maka luar negeri akan menunjukkan kesediaan yang lebih besar untuk menanamkan modal di Indonesia berupa perbungan oleh kaum partikelir asing dan berupa pinjaman-pinjaman pemerintah.

Peraturan Sertifikat Devisa kemudian disusul dengan Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat tanggal 19 Maret 1950 tentang “Operasi Gunting Sjafruddin” karena sebagai Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengambil keputusan untuk memotong dua dengan gunting uang merah dengan uang *de Javasche Bank* dari pecahan Rp 5 ke atas. Pecahan Rp 2,50 dan yang lebih kecil tidak mengalami pengguntingan. Uang ORI juga tidak digunting. Keputusan ini menembak beberapa sasaran: pengganti uang yang bermacam-macam itu dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dengan demikian menurunkan harga barang, mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib (Beng To, 1991: 209). Pengguntingan uang pada tanggal 19 Maret 1950 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Keuangan No.PU/1 tanggal 19 Maret 1950 terhadap uang kertas *De Javasche Bank* dan uang pendudukan Belanda (Parera,ed., 2005: 96).

Sejak pukul 8 malam tanggal 19 Maret 1950, uang kertas pecahan Rp 5 keatas digunting menjadi dua. Bagian kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nominalnya, tetapi sejak tanggal 22 Maret 1950 bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat lain yang ditentukan. Batas terakhir penukaran itu sampai dengan tanggal 16 April 1950. Sesuah itu, kalau belum ditukarkan juga, bagian kiri itu tidak laku. Sedangkan bagian kanan dari uang itu dinyatakan tidak laku, tetapi dapat ditukar dengan surat obligasi pemerintah sebesar setengah dari nilai nominalnya. Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dinamakan Obligasi Pinjaman Darurat 1950. Bunganya ditetapkan sebesar 3% setahun (Rosidi, 2011: 250-251).

Pemeroan dilakukan juga terhadap simpanan-simpanan pada bank dan surat-surat perbendaharaan. Yang dimaksud dengan simpanan pada bank ialah simpanan pihak ketiga yang dapat ditagih sewaktu-waktu maupun yang penagihannya tergantung pada suatu masa, serta segala simpanan yang dipandang oleh atau atas nama Menteri Keuangan sebagai simpanan di bank. Bank diwajibkan memindahkan setengah dari simpanan-simpanan itu kepada sebuah rekening khusus yang dinamakan "Pendaftaran Pinjaman Negara 3% 1950" yang hanya dapat digunakan untuk membeli obligasi negara. Langkah pembersihan uang pada bulan Maret 1950 berhasil mengurangi jumlah uang kartal sekitar 1,6 milyar, sehingga posisi uang yang beredar dapat ditekan menjadi sebesar 4,3 milyar pada akhir tahun 1950 (Parera,ed., 2005: 96-97).

Manurut Sjafruddin, uang boleh menjadi sampah, cita-cita boleh terbang dan hancur binasa, tetapi manusia yang hidup dan mengerti akan kewajibannya tak boleh jemu-jemu berjuang dan bekerja, berikhtiarlah mencari jalan baru untuk mencapai kebahagiaan, yang menjadi sumber bagi segala cita-cita. Untuk menyelamatkan negara, pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan yang cepat dan radikal. Dan satu-satunya jalan yang menurut pendapat pemerintah dapat membawa ketujuan yang kita maksud, ialah mengadakan pinjaman Negara dan mengurangi peredaran uang (Prawiranegara, 2011: 36-40).

Ditinjau dari sudut kemakmuran, maka peraturan devisa baru akan memberikan keuntungan kepada kaum eksportir jauh lebih besar daripada di masa lampau. Oleh karena itu maka ekspor akan bertambah, dan oleh sebab itu, maka impor pun dapat diharapkan akan bertambah pula. Peraturan itu memang memberatkan para importir bangsa yang baru saja timbul, yang sangat kekurangan modal, tetapi kepentingan para petani yang menghasilkan sebagian besar dari pada barang-barang ekspor tidak boleh dikurbankan (Rosidi, 2011: 253-254).

Mengenai obligasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah RIS dinyatakan, bahwa sebelum keluar obligasi itu bagian-bagian kanan dari mata uang yang sudah dipotong sekarang ini boleh diperdagangkan, sebab diketahui paling sedikit harga obligasi itu adalah dari seratus rupiah. Dianjurkan kepada rakyat dalam memperdagangkan itu jangan sampai terlalu rendah dari harga yang semestinya. Mengenai usaha untuk menaikkan harga sesudah dikeluarkannya peraturan baru itu akan diadakan tindakan-tindakan keras oleh pemerintah. Berhubung dengan adanya tindakan-tindakan oleh berbagai perusahaan-perusahaan perkapalan dan lain-lain dari pihak asing yang menaikkan harga hingga 200%, maka pemerintah membentuk panitia untuk mengadakan perundingan dengan perusahaan-perusahaan asing. Menurut pendapat pemerintah, tidak pada tempatnya perusahaan-perusahaan itu menaikkan tarifnya hingga 200%, karena perusahaan-perusahaan tersebut banyak sekali mendapat jasanya di Indonesia (misalnya pembayaran upah buruh) yang dalam mata uang Indonesia tidak naik. Demikian pula pemerintah tidak menaikkan ongkos-ongkos yang harus dibayar perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan asing itu tetap pada tindakan yang sudah diambilnya, maka pemerintah akan juga mengadakan tindakan-tindakan pembalasan, misalnya menaikkan ongkos-ongkos pelabuhan hingga beberapa persen (*Kedaulatan Rakyat*, 22 Maret 1950).

Sjafruddin sebagai Menteri Keuangan juga mengatur penukaran uang ORI dan jenis-jenis uang lain. Tanggal 1 Januari 1950 Menteri Keuangan sudah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa ORI dan mata uang sejenisnya sebagai alat pembayaran yang sah akan ditarik mulai tanggal 1 Mei 1950, tetapi karena keputusan Menteri Keuangan 19 Maret 1950 itu, maka soal penukaran ORI

dan uang-uang lain sejenisnya dipercepat. Uang-uang itu sudah dapat ditukarkan sejak tanggal 27 Maret 1950 sekaligus dengan penukaran bagian kiri uang federal. Tetapi berlainan dengan bagian kiri uang federal yang harus ditukarkan paling lambat tanggal 17 April 1950, maka penukaran ORI dan uang-uang lain sejenisnya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 1 Juni 1950 yang kemudian diperpanjang lagi sampai tanggal 21 Juni 1950 (Rosidi, 2011: 259).

Sebagai upaya untuk mencegah salah paham ditegaskan bahwa Kurs yang ditetapkan merupakan kurs yang akan digunakan saat penukaran ORI dengan uang RIS sementara mulai 30 Maret 1950, di rumah-rumah pegadaian. Segala uang yang ada akan ditukar semuanya, dan untuk penukaran itu akan diberi kesempatan seluas-luasnya sehingga siapa pun juga layak menukarkan ORI yang ada padanya. Selama penukaran itu boleh dipakai sebagai alat pembayaran yang sah sampai 1 Mei 1950. Untuk dapat menukarkan ORI orang harus mempunyai surat keterangan dari lurah atau pamong praja yang sederajat. Untuk anggota Angkatan Perang sebagai pengganti lurah dapat diterima surat keterangan dari Komandan yang bersangkutan. Di kantor-kantor penukaran diadakan panitia Pemeriksaan uang palsu, anggotanya akan diangkat dari pamong praja dan Polisi. Setiap orang selama masa penukaran hanya dibolehkan menukarkan satu kali (*Kedaulatan Rakyat*, 28 Maret 1950).

Karena daya beli ORI berbeda-beda dengan jenis uang lainnya, maka kurs yang ditetapkan untuk penukaran pun tidaklah sama. ORI misalnya ditetapkan kursnya 125 buat tiap *f* 1; sedangkan URIBA yang beredar di Aceh, 175 buat setiap *f* 1; untuk ORIPS yang beredar di Sumatera Tengah 125 buat setiap *f* 1; untuk URITA yang beredar di Tapanuli, 350 buat setiap *f* 1; URISU yang beredar di Sumatera Utara, 450 buat setiap *f* 1, dan sebagainya. Tetapi setiap orang paling banyak hanya boleh menukarkan sampai senilai *f* 50 saja, tidak boleh lebih (Beng To, 1991: 144).

Ada beberapa faedah yang dapat dicapai dengan peraturan yang dikeluarkan Sjafruddin, ialah: a. Merupakan cambuk bagi masyarakat untuk bekerja lebih keras. Dengan dikurangnya peredaran uang, bisa diharapkan bahwa harga-harga barang tentu akan turun, sedangkan upah-upah akan tetap

sebagaimana biasa; b. Kekacauan dalam soal uang, yang juga merupakan salah satu sebab kurang lancarnya perekonomian, akan lenyap. Juga ORI baik di Jawa maupun Sumatera akan bersama-sama ditarik dari peredaran. Uang federal yang lama akan lenyap pada tanggal 17 April, uang ORI pada tanggal 1 Mei 1950; c. Kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia dalam masalah-masalah keuangan dan perekonomian akan bertambah besar, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan kredit atas dasar-dasar yang sehat akan menjadi lebih besar lagi. Dunia luar akan melihat, bahwa Indonesia dengan kekuatan sendiri, dengan tidak menggantungkan nasibnya pada belas kasihan dari negara-negara asing, benar-benar sanggup menyelesaikan soal-soalnya sendiri. Dengan sendirinya kedudukan politik Indonesia akan kuat (Prawiranegara, 2011: 40-41).

5.1.2 Peran Sjafruddin Sebagai Gubernur Bank

Pemerintahan RIS yang baru berjalan tujuh bulan, sudah timbul suarasiswa yang menginginkan negara kesatuan. Mayoritas bangsa Indonesia tidak puas dengan sistem federasi. Negara-negara bagian berusaha untuk meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia, sehingga jumlahnya menyusut. Mulailah diadakan perundingan antara negara Republik Indonesia dengan Pemerintah RIS yang pada tanggal 19 Mei 1950 bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan. Langkah selanjutnya ialah menyusun Undang-Undang Dasar RIS. Penyusunan rencana Undang-Undang Dasar itu selesai pada tanggal 20 Juli 1950 dan Presiden Soekarno menandatangani pada tanggal 15 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar itu kemudian terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara (Poesponegoro & Notosusanto, 1993: 209-210).

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara RIS dibubarkan dan dilanjutkan oleh negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan. Ir. Soekarno terpilih kembali sebagai presiden, dan Mohammad Hatta terpilih sebagai Wakil Presiden. Karena Undang-Undang Dasar Sementara menganut system parlementer, maka pemerintah akan diselenggarakan oleh kabinet yang mendapat kepercayaan dari parlemen. Sebagai formatur kabinet yang pertama berhasil membentuk pemerintahan ialah M. Natsir yang pada bulan September menyusun

sebuah kabinet yang kuat karena banyak tokoh yang ahli dan cakap duduk di dalamnya. Dalam kabinet ini intinya adalah Partai Masyumi, dan Sjafruddin duduk sebagai Menteri Keuangan

Banyaknya pemogokan dan karena produksi belum berjalan, maka Sjafruddin sebagai Menteri Keuangan mempunyai tanggungjawab untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu sumber pemasukan uang negara yang dilihatnya masih belum berjalan dengan baik ialah pemungutan pajak. Untuk itu Sjafruddin mengajukan sebuah rencana Undang-undang ke parlemen tentang Pajak Peredaran. Setelah Undang-undang Darurat tentang Pajak Peredaran itu diundangkan, timbul reaksi yang keras dalam parlemen. Resuna Said dan kawan-kawannya sesama anggota parlemen mengajukan sebuah mosi yang menghendaki agar Undang-undang Darurat tentang Pajak Peredaran itu dicabut kembali. Namun ternyata sebelum parlemen membahas mosi Rasuna Said itu, pada Maret 1951 kabinet Natsir sudah terlebih dahulu jatuh karena Kabinet mengambil alih kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat mengenai otonomi daerah yang menyebabkan beberapa anggota Parlemen mengajukan mosi (Ricklefs, 1991:364).

Kabinet berikutnya yaitu kabinet Soekiman dan sampai pembentukan PRRI, Sjafruddin tidak duduk dalam kabinet. Meskipun tidak duduk dalam kabinet, Sjafruddin masih menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah. Sjafruddin Prawiranegara mengkritik perlunya selalu berkepala dingin dalam menghadapi persoalan-persoalan negara. Misalnya mengenai nasionalisasi *De Javasche Bank*. Sjafruddin menganjurkan agar persoalan *De Javasche Bank* harus dipikirkan baik-baik. Bukan karena tidak setuju dengan nasionalisasi, tetapi Sjafruddin sadar bahwa tenaga Indonesia belum cukup mampu untuk menanganinya. Juga dalam menggunakan tenaga-tenaga ahli Belanda. Sjafruddin mengkritik orang-orang yang tidak menggunakan sebagaimana mestinya tenaga-tenaga ahli itu, padahal sudah dibayar dan tenaga mereka memang bermanfaat. Kalau tidak dipakai dengan sebaik-baiknya, mereka mungkin tidak mau memperpanjang kontraknya, lalu mereka melamar ke badan-badan internasional yang tidak mustahil mengirimkannya kembali ke Indonesia karena kita memang

memerlukannya. Kalau begitu, Indonesia harus membayar mereka lagi, bahkan dengan harga yang lebih mahal (Rosidi, 2011: 266-267).

Ketika Mr. Jusuf Wibisono yang menjadi Menteri Keuangan dalam kabinet Soekiman, Ia mengambil langkah-langkah ke arah nasionalisasi *De Javasche Bank*. Pada tanggal 28 Mei 1951, Perdana Menteri Dr. Soekiman menyampaikan maksud itu kepada parlemen yang juga menyetujui gagasan tersebut. Pada tanggal 19 Juni 1951 dibentuklah suatu panitia oleh pemerintah yang bertugas untuk mengajukan usul-usul mengenai nasionalisasi *De Javasche Bank* (Prawiranegara, 2011: 106). Setelah Presiden *De Javasche Bank* Dr. A. Houwik mengajukan permohonan berhenti karena Houwik merasa tidak dipercayai lagi dengan tidak diberitahu oleh pemerintah mengenai nasionalisasi (Thee Kian Wie, ed., 2005: 34), maka salah satu Direksi Bank Paul Spies mencalonkan Sjafruddin Prawiranegara sebagai penggantinya Presiden *De Javasche Bank*. Sjafruddin menerima tawaran pemerintah, tetapi dengan syarat bahwa peraturan gaji para petugas bank, juga setelah dinasionalisasikan nanti tidak akan diubah dan dinasionalisasikan. Dengan perkataan lain, tingkat pengupahan para karyawan bank tidak akan diturunkan pada tingkat pegawai negeri Indonesia. Syarat itu diterima oleh Dr. Soekiman dan kabinet. Sjafruddin khawatir kalau pimpinan *De Javasche Bank* yang baru tidak memelihara kelanjutan usaha Indonesianisasi, akan timbul kekacauan dalam kehidupan perbankan. Sebaliknya dengan menerima tawaran itu, maka dia akan dapat melanjutkan proses Indonesianisasi. Sjafruddin Prawiranegara diangkat sebagai Presiden *De Javasche Bank* pada tanggal 12 Juli 1951 (Rachbini, ed., 2000: 2).

Pada tanggal 15 Desember 1951 keluarlah Undang-undang tentang *Nasionalisasi De Javasche Bank NV* (Prawiranegara, 2011: 106). Dalam pasal 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa saham-saham *De Javasche Bank* yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia segera dicabut haknya oleh Republik dan pindah menjadi milik penuh dan bebas dari negara (Beng To, 1991: 248-249). Sebagai Presiden *De Javasche Bank* yang saham-saham sudah dinasionalisasikan, Sjafruddin harus melakukan langkah-langkah Indonesianisasi dan nasionalisasi lebih lanjut. Sudah sejak ketika Sjafruddin menjadi Menteri Keuangan, *De*

Javasche Bank melakukan pendidikan tenaga-tenaga ahli bank bagi orang-orang Indonesia yang muda-muda. Setelah berlangsung dua tahun baru ada 26 tenaga muda yang menjadi tenaga staf (Rosidi, 2011: 278-279).

Setelah dilakukan nasionalisasi De *Javasche Bank* tahun 1951, Pemerintah menyampaikan rencana Undang-undang pokok Bank Indonesia yang merupakan Undang-undang bagi Bank Sentral kepada parlemen. Sjafruddin mengemukakan pendapatnya mengenai hubungan antara Bank Sentral dengan Pemerintah. Menurut Sjafruddin jika Bank Sentral didudukkan di bawah pemerintah akan berbahaya karena menurut sejarah semakin lama pemerintah akan ikut campur dalam urusan uang dengan berbagai alasan. Antara lain untuk mencegah pemalsuan uang atau untuk menguasai uang itu agar memperoleh keuntungan. Jika Bank Sentral diberikan otonomi terhadap pemerintah, maka selain sebagai alat dan kasir pemerintah, Bank Sentral dapat pula menjadi penyedia keuangan bagi pemerintah dan bila perlu dapat menolak permintaan kredit dari pemerintah berdasarkan tanggungjawab Bank Sentral terhadap pemeliharaan nilai mata uang. Dalam hal ini pemerintah hanya menjadi pengawas. Untuk maksud tersebut, pemerintah dapat menempatkan seorang atau beberapa komisaris pada Bank Sentral sebagai wakil pengawasan (Parera,ed., 2005: 32-34).

Pada tanggal 2 Juni 1953, diundangkanlah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI) tahun 1953 no.11 yang sudah disahkan tanggal 19 Mei 1953 sebelumnya. Dan pada tanggal 1 Juli 1953, didirikanlah Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-undang tersebut, kedudukan Bank Indonesia adalah menggantikan *De Javasche Bank* dan bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia (Parera, ed., 2005:38). Di Indonesia, *octrooi* atau hak untuk mengeluarkan uang kartal hanya diberikan kepada satu bank sirkulasi saja yaitu Bank Indonesia. monopoli untuk mengeluarkan uang itu terdapat dalam pasal 8 UUPBI 1953 yang berbunyi antara lain bank berhak mengeluarkan uang kertas bank, dan uang kertas itu bersifat alat pembayaran yang sah sampai setiap jumlah (Prawiranegara, 2011:184).

Sebagai Presiden *De Javasche Bank* yang akan menjadi Gubernur Bank Indonesia kalau sudah berdiri, maka Sjafruddin sejak awal aktif membantu

penyusunan rencana Undang-undang Pokok tentang Bank Indonesia. Banyak gagasannya yang diterima dan masuk dalam undang-undang, misalnya tentang adanya suatu Dewan Moneter yang unik dan bersifat khas Indonesia. Karena tidak terdapat di dalam susunan perbankan yang lain ataupun di negeri lain. Dewan Moneter itu merupakan pimpinan tertinggi Bank Indonesia, tetapi juga merupakan Dewan Pemerintah yang didalamnya turut duduk Gubernur Bank Indonesia (Rosidi, 2011: 281).

Tugas Dewan Moneter itu menurut pasal 22 UUPBI tahun 1953 ialah: menetapkan kebijaksanaan moneter umum dari bank, memberi petunjuk kepada Direksi tentang kebijaksanaan bank dalam urusan-urusan yang lain, sekedar kepentingan umum memerlukannya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan bank seperti mengatur nilai satuan uang Indonesia supaya tetap stabil, memajukan perkembangan urusan kredit dan urusan bank dan mengawasinya, mengurus dan menyelenggarakan administrasi persediaan alat-alat pembayaran luar negeri dan lain-lain. Dewan Moneter terdiri dari tiga orang, yaitu Menteri Keuangan sebagai Ketua, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Dengan demikian Dewan Moneter itu merupakan kuasa sehari-hari pemerintah dalam soal politik moneter dan Direksi Bank Indonesia dengan aparatnya merupakan badan pelaksanaan dari politik moneter itu. Dalam UUPBI tahun 1953 dengan tegas dicantumkan bahwa tanggungjawab terakhir atas kebijaksanaan moneter berada ditangan pemerintah (pasal 22 ayat 2) (Parera,ed., 2005: 43-44).

5.2 Peran Sjafruddin Sebagai Menteri Kemakmuran Tahun 1948

Presiden Soekarno mengangkat Mohammad Hatta sebagai formatur kabinet setelah Amir Sjarifuddin mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Alasan Amir Sjarifuddin mengundurkan diri karena masyarakat sudah tidak mempercayai lagi kepemimpinan berpolitiknya, baik melalui delegasi partai-partai yang terdiri dari Masyumi dan PNI, maupun langsung kepada Perdana Menteri melalui demonstrasi secara tertib ke Istana Negara. Pada kabinet Hatta yang diumumkan pada 29 Januari 1948, Mohammad Hatta sendiri sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Dr. Soekiman Wirjosandjojo sebagai

Menteri Dalam Negeri, H. Agoes Salim sebagai Menteri Luar Negeri, M. Natsir sebagai Menteri Penerangan, Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran, dan K.H. Masjkur yang menjadi Menteri Agama (Kahin, 292-293).

Program kabinet Hatta ialah melaksanakan Persetujuan Renville yang dibuat oleh Amir Sjarifuddin dengan perantaraan Komisi Tiga Negara (KTN), mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat, melakukan reorganisasi dan rasionalisasi dalam tubuh ketentaraan dan sedapat mungkin menyelenggarakan pembangunan ekonomi. Sebagai Menteri Kemakmuran, Sjafruddin mendapat tugas untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk perekonomian (Poespaonagoro & Notosusanto, 1993: 151).

Pada awal tahun 1948 keadaan perekonomian rakyat di daerah Republik Indonesia sangat buruk sekali. Agresi Militer Belanda mengakibatkan berbagai daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti daerah perkebunan, kawasan industri dan pelabuhan jatuh ketangan Belanda. Blokade ekonomi atas daerah perairan yang dikuasai Republik Indonesia mengakibatkan lumpuhnya kegiatan perdagangan dan sulitnya pemasukan uang ke kas negara (Ricklefs, 1991:338-339). Sementara itu pihak Belanda pun mengacaukan nilai uang Republik Indonesia dengan jalan mencetak dan mengedarkan ORI palsu sehingga ORI mengalami inflasi yang hebat. ORI itu tidak memenuhi syarat penting yang harus ada pada tiap macam uang yaitu harus sukar sekali dipalsu orang. Kekurangan ini tidak dapat dibebankan kepada pengusaha-pengusaha yang mencetak uang tersebut, karena mencegahnya itu di luar kemampuan pencetaknya. Demikian maka mudah sekali Belanda mencetak uang palsu di dalam peredaran (*Sikap*, 24 Maret 1949).

Menghadapi situasi yang demikian, Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran melakukan usaha-usaha seperti mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1948 tertanggal 22 Maret 1948 tentang pengumpulan bahan makanan rakyat oleh pemerintah. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga persediaan bahan makanan yang cenderung semakin menipis dan terjadi pula pemindahan makanan ke daerah pendudukan Belanda. Pada tanggal 9 Juli 1948 ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 15 untuk menghitung ternak berupa

kuda, kerbau, kambing, domba dan sapi. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa untuk memajukan perekonomian perlulah diketahui jumlah ternak yang sebenarnya yang ada di seluruh daerah Republik. Data statistic tersebut dapat dijadikan dasar rencana pekerjaan dalam pembangunan, baik dalam lapangan peternakan, lapangan pertanian maupun lapangan perekonomian rakyat pada umumnya. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1948 tentang pemberantasan penimbunan barang-barang penting seperti beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula, minyak tanah, jagung, gaplek, tapioka, garam, kopi dan teh. Peraturan ini ditetapkan untuk memberantas penimbunan bahan makanan penting supaya peredaran barang-barang tersebut berjalan lancar (Rosidi, 2011: 163).

Program lain Kementerian Kemakmuran yang lain adalah memberikan kepada rakyat kesempatan yang sepuh-penuhnya untuk berusaha sendiri. Caranya ialah dengan melakukan propaganda dan mencetak berbagai buku tentang pembuatan bermacam-macam barang keperluan hidup sehari-hari, seperti cara membuat sabun, gelas, sikat gigi dan sebagainya. Mengadakan transmigrasi besar-besaran ke Sumatera. Kalau bisa akan dilakukan dalam sepuluh tahun sepuluh juta pemindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera. Di berbagai daerah telah dilaksanakan dengan menggali waduk-waduk dan memperbaiki usaha irigasi yang sudah ada. Berusaha sekeras-kerasnya untuk memperbesar produksi. Pendapat Sjafruddin tentang program yang dibuat, sebagian besar penduduk Indonesia adalah tani dan tani ini hampir semua tergabung dalam persatuan tani. Oleh karena kebanyakan rakyat Indonesia beragama Islam, dengan demikian Sjafruddin yakin bahwa selama menteri kemakmuran dari Masjumi tentu program ini dapat dijalankan dengan pertolongan penuh dari pihak rakyat.

Pandangan mengenai kapital asing menurut Sjafruddin sama sekali tidak keberatan bahwa kapital asing masuk di Indonesia, syaratnya rakyat Indonesia jangan menderita. Untuk membangun negara yang masih muda ini dibutuhkan sekali kapital asing misalnya untuk usaha membangun yang sangat membutuhkan banyak mesin-mesin dari luar. Kesulitan yang dihadapi Menteri Kemakmuran dalam usahanya menyehatkan dan meningkatkan perekonomian rakyat dan negara adalah dengan rasionalisasi yaitu penyesuaian antara beban kerja dengan jumlah

karyawan. Namun program rasionalisasi sukar dilaksanakan karena terpaksa mengurangi karyawan. Tindakan ini akan menimbulkan gejolak hebat dari kaum buruh yaitu peristiwa pabrik karung Delanggu, Klaten yang terjadi pada tanggal 26 Februari 1948 yang dipimpin OBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan SARBUPRI (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia). Sikap terbuka dan kesediaan pemerintah menyelesaikan kasus Delanggu itu ternyata tidak mendapat sambutan baik dari pihak penuntut (buruh). Pihak penuntut melontarkan tuduhan yang bukan-bukan terhadap pemerintah dan orang-orang dari kalangan pemerintah (BTN). Jelaslah bahwa kasus Delanggu bukan hanya masalah buruh, melainkan telah berkembang menjadi masalah politik yang berkaitan dengan sikap oposisi dengan golongan kiri yang bergabung dibawah naungan FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang dibentuk pada tanggal 26 Februari 1948, terhadap Kabinet Hatta (Rosidi, 2011: 164-167).

Selama beberapa bulan pihak FDR telah menghasut dan menyiarkan berita-berita bohong terhadap dan tentang pemerintah. Untuk itu, menurut Sjafruddin penting dikemukakan tentang politik perekonomian pemerintah Republik Indonesia yang prinsipnya berbeda dengan politik kolonial Belanda. Belanda kolonial mengutamakan kepentingan negeri Belanda dan warganya dengan menjalankan politik perekonomian yang bersifat export bahan-bahan mentah untuk pasar dunia. Politik ini dijalankan dengan konsekuen dan berpedoman mendapat keuntungan sebesar-besarnya untuk kaum modal barat (Belanda): upah pekerja dan sewa tanah untuk perusahaan-perusahaan dipertahankan serendah-rendahnya; pengangkutan bahan dari Indonesia sedapat mungkin dikerjakan oleh maskapai-maskapai Belanda; penjualan bahan ke pasar dunia sebanyak mungkin dijalankan lewat negeri Belanda, sehingga keuntungan menjadi berlipat ganda.

Sebaliknya pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu pemerintah nasional, suatu dari, oleh, dan untuk rakyat, dalam segala tidakan-tindakannya terutama berpedoman pada kepentingan rakyat banyak. Begitupun politik ekonominya ditujukan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga perekonomian yang berdasar export, sedang keperluan barang-barang

penting guna hidup rakyat sehari-hari digantungkan pada import, ditinggalkan sama sekali. Export masih perlu, yaitu untuk membiayai import barang-barang yang memang tidak/belum mungkin dibuatnya dinegeri kita sendiri dan untuk membiayai keperluan-keperluan kota di luar negeri. Akan tetapi yang didahulukan ialah membangun industri. Disamping membangun industri, maka transmigrasi secara besara-besaran dari Jawa ke Sumatera dan pulau-pulau lain, akan memberi perluasan tanah kepada petani di Jawa dan akan membuka tanah-tanah baru yang amat subur.

Menasionalisir seluruh perusahaan bangsa asing tidak mungkin dan tidak perlu karena sempitnya keuangan negara; Perusahaan yang dinasionalisir pada masa sekarang tidak selalu memberi jaminan memberi faedah yang sebesar-besarnya. Sering lebih efisien dalam tangan partikelir tetapi dibawah pengawasan negara; Banyak perusahaan-perusahaan asing berdasar atas export ekonomi lama yang tidak cocok dengan politik ekonomi pemerintah sekarang. Modal asing dibutuhkan oleh Indonesia, perlu pada modal tersebut diberikan kemungkinan mendapat keuntungan yang cukup besar untuk menarik modal asing (baru) ke Indonesia. Supaya modal asing itu tidak akan merajalela disini, dengan menetapkan syarat-syarat mengenai jaminan buruh, sewa tanah dan sebagainya (Undang-Undang Sosial). Pemerintah tidak menghalang-halangi gerakan buruh dan tani, bahkan sebaliknya: pemerintah menghendaki gerakan buruh dan tani yang kuat (Arsip Kementerian Penerangan no 139).

5.2.1 Peran Sjafruddin dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang lapangan terbang Maguwo. Pada suasana itu, kabinet RI mengadakan sidang kilat istimewa di Istana Negara Yogyakarta (Moehadi, 1981:17). Salah satu keputusan penting dalam sidang yaitu memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu di Bukit tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Keputusan lain ialah memberikan mandat kepada dr. Sudarsono, L. N. Palar, dan A. A. Maramis di New Delhi (India) untuk membentuk pemerintahan di luar negeri jika Sjafruddin tidak berhasil membentuk

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (Rasjid, 1982: 19-21). Keputusan itu dicetuskan karena Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Yogyakarta tidak mungkin untuk diteruskan (Arsip Sjafruddin Prawiranegara No 14).

Sjafruddin Prawiranegara pada awalnya tidak begitu percaya berita tentang jatuhnya Ibukota Yogyakarta dan tertangkapnya Presiden Soekarno, Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta dan sejumlah pembesar tinggi lainnya. Sjafruddin menduga berita tersebut hanya propaganda Belanda untuk menghancurkan perjuangan bangsa Indonesia (Zed, 1997: 95). Gagasan untuk membentuk PDRI diambil didasarkan rasa tanggungjawab terhadap kelanjutan perjuangan kemerdekaan yang telah membawa korban begitu banyak. Perjuangan itu tidak boleh dihentikan begitu saja dengan ditawannya Presiden, Wakil Presiden dan anggota kabinet RI lainnya. Menghentikan perjuangan berarti pengkhianatan pada cita-cita semula dan terhadap korban yang telah mati, cacat seumur hidup di medan juang. Sambil menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Yogyakarta, Sjafruddin mengambil inisiatif untuk bergerak (Rosidi, 2011: 179).

PDRI yang dibentuk di Sumatra dengan susunan sebagai berikut. Mr. Sjafruddin prawiranegara sebagai ketua, menteri Pertahanan dan Penerangan. Menteri luar negeri Mr. AA. Maramis, sebagai Menteri Dalam Negeri dan Kesehatan dr. Sukiman. Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan. Menteri Kemakmuran I. Kasimo dan sebagai Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo. Menteri Agama Maskur. Mr. Teuku Mohamad Hasan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Ir. Indradjaja sebagai Menteri Perhubungan. Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerdjaan Umum. Mr. St. Moh Rasjid sebagai Menteri Perburuhan dan Sosial. Supeno sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda (Arsip M. Rasjid no.44).

Sehari setelah PDRI didirikan, Sjafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI menyampaikan pidato radio yang ditransmisikan kepada semua stasiun radio. Isi pidato itu ialah “Belanda berhasil menawan Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri dan beberapa pembesar lain dan mengira dengan ditawannya pemimpin tertinggi, menyebabkan aparaturnegara putus asa. Negara Republik Indonesia tidak hanya Soekarno-Hatta, sekalipun keduanya merupakan

pemimpin. Hilangnya Soekarno-Hatta, sementara atau selamanya, rakyat Indonesia tetap menghadirkan pemerintahan baru”. Kepada seluruh angkatan perang Republik Indonesia Sjafruddin juga menyerukan pertempuran di tiap tempat dengan berbagai cara untuk membasmi Belanda (Imran, Djamhari, dan Chaniago, 2003: 86-87).

Menteri kemakmuran dalam kabinet Hatta yaitu Sjafruddin Prawiranegara mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk segera membentuk pemerintah darurat sebagai langkah untuk menanggapi situasi yang semakin mengkhawatirkan akibat dari Agresi Militer II. 19 Desember 1948 Belanda melancarkan serangan kepada pemerintah Indonesia yang berada di Yogyakarta. Untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan pemerintahan Presiden Soekarno mengirim dua surat kawat kepada Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi dan Mr. A.A. Maramis, Dr. Soedarsono dan L.N. Palar di New Delhi. Tetapi kedua surat kawat tersebut tidak sampai kepada alamat yang dituju karena tentara Belanda menyerbu dan memusnahkan stasiun radio dan kantor telekomunikasi. Presiden Soekarno atau pun Menteri Penerangan M. Natsir tidak mendapat kesempatan untuk memberi penjelasan kepada rakyat (Rosidi, 1986: 110).

Serangan yang dilakukan Belanda atas Yogyakarta dan Bukittinggi pada hari minggu pagi tanggal 19 Desember 1948 tidak diduga oleh pemerintah. Setelah Bukittinggi di bom oleh tentara Belanda pada hari minggu tanggal 19 Desember 1948, Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang pada saat itu sedang berkunjung ke Bukittinggi untuk meninjau tingkat kemakmuran masyarakat Sumatera bersama Panglima Tentara Teritorial Sumatera Kolonel R. Hidayat, mengunjungi ketua Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatera Mr. T.M. Hasan untuk mengadakan perundingan membahas kondisi pemerintah di Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara mengusulkan untuk segera membentuk pemerintah darurat karena kondisi pemerintahan di Jawa sedang kacau akibat ditangkapnya Presiden Soekarno, Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta dan sejumlah pembesar tinggi lainnya oleh Belanda (Rasjid, 1982: 12).

Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ditetapkan pada tanggal 22 Desember 1948 di desa Halaban (Rosidi, 1986: 114). Kemudian

pusatnya menjadi berpindah-pindah dari Sumatera sampai Aceh sesuai dengan kondisi keamanan pada waktu itu.

Adapun susunan dari PDRI sebagai berikut:

- 1) Ketua, merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan, Mr. Sjafruddin Prawiranegara
- 2) Wakil ketua, merangkap menteri kehakiman, Mr. Soesanto Tirtoprodjo. Setelah terdengar kabar bahwa sdr. Supeno gugur karena dibunuh Belanda, maka Beliau merangkap juga Menteri Pembangunan dan Pemuda.
- 3) Menteri Luar Negeri, Mr. A. A. Maramis.
- 4) Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan, Dr. Soekiman.
- 5) Menteri Keuangan, Mr. Loekman Hakim.
- 6) Menteri Kemakmuran, I.J Kasimo.
- 7) Menteri Agama, Masjkur.
- 8) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. TM. Hasan.
- 9) Menteri Perhubungan, Ir. Indratjaja.
- 10) Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Sitompoel.
- 11) Menteri Perburuhan dan Sosial, Mr. ST. Mohd. Rasjid.

Sjafruddin Prawiranegara dalam struktur susunan pemerintah darurat republik Indonesia hanya menggunakan istilah ketua. Pada sisi lain, istilah ketua tidak dikenal dalam UUD Republik Indonesia. Ada dua alasan mengapa tidak digunakan istilah “presiden”. Pertama, Mr. Sjafruddin Prawiranegara tidak mengetahui adanya mandat langsung dari Presiden Soekarno, kedua berdirinya PDRI didorong oleh keprihatinan dan kerendahan hati untuk meneruskan perjuangan Bangsa (Rosidi, 1986: 114). Namun demikian, meskipun yang digunakan istilah Ketua PDRI, akan tetapi secara *de jure* Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebenarnya adalah Presiden Republik Indonesia dengan mandat dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pada waktu itu tidak dapat bertindak sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sjafruddin Prawiranegara membentuk PDRI berfungsi sebagai napas penyambung sementara pemerintahan Indonesia hingga berlangsungnya perundingan Roem-Roijen pada 7 Mei 1949 (Noer, 2011: 284).

Para tokoh-tokoh PDRI merasa kecewa dengan pelaksanaan perundingan Roem-Roijen karena kelompok Bangka dalam pelaksanaan perundingan Roem-Roijen tidak berkoordinasi dengan PDRI. Sjafruddin Prawiranegara selaku ketua PDRI merasa dilangkahi oleh pihak Bangka dalam menjalankan diplomasi dengan pihak Belanda. Menurut Sjafruddin, PDRI selaku pemerintah yang sah dan bukan tawanan harus diberi wewenang dalam pelaksanaan perundingan yang hasil akhirnya menyakut kesepakatan antara Indonesia dengan pihak Belanda. Protes-protes PDRI dan pimpinan angkatan perang terhadap Pernyataan Roem-Roijen tentu saja terdengar oleh para pemimpin yang ada di Bangka. Hatta menanggapi dengan usaha menemui Sjafruddin untuk memberikan penjelasan mengenai latar belakang kebijakan yang diambil pihak Bangka. Hatta ditemani oleh Ali Sastroamidjojo dan Moh. Natsir. (Imran, Djamhari, dan Chaniago, 2003: 264). Pada 5 Juni 1949, Hatta bersama anggota rombongannya berangkat berangkat ke Aceh. Hattalah yang paling merasa berkepentingan untuk mencari Sjafruddin ke Sumatera, guna menunjukkan bahwa para pemimpin di Bangka sama sekali tidak mengabaikan PDRI. Akan tetapi Hatta tidak bertemu dengan Sjafruddin di Kotaraja. Hatta bertemu dengan Kol. Hidayat, Panglima Sumatera (Zed, 1997: 279).

Pada tanggal 10 Juli 1949, Sjafruddin kembali ke Yogyakarta. Sjafruddin disambut oleh Soekarno setibanya di Yogyakarta. Sjafruddin menerangkan bahwa PDRI tidak berada di belakang Roem-Royen, tapi berada di belakang rakyat, berjuang dengan rakyat dan untuk rakyat. Pada tanggal 13 Juli 1949, kabinet Hatta bersidang. Hatta melakukan perombakan kabinet. Kabinet yang baru terbentuk itu disebut Kabinet Hatta II. Dalam kabinet ini, Sjafruddin diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri. Pada sidang kabinet Hatta ini juga, Sjafruddin menegaskan bahwa mandat yang dikirimkan kepadanya oleh Soekarno dan Hatta tidak pernah diterimanya. Sjafruddin dan tokoh-tokoh lain di Sumatera membentuk PDRI semata-mata berdasarkan hati nurani untuk mengisi kevakuman pemerintahan. Pada kesempatan dalam sidang ini, Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta (Zed, 1997: 288).

BAB 6. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan penjabaran dalam penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Latar belakang Sjafruddin sebagai salah satu tokoh nasional yang berpengaruh pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia diawali dalam lingkungan pendidikan. Sjafruddin dididik dalam lingkungan sekolah Belanda dan hanya mendapatkan pendidikan agama secara informal dari lingkungan keluarga dan kampungnya. Sjafruddin menempuh pendidikan di ELS, MULO, dan AMS di Bandung. Sjafruddin kemudian masuk ke RHS dan terlibat dalam organisasi Mahasiswa yang bernama USI (Unitas Studiosorum Indoneesiensis). Dan melanjutkan ikut dalam organisasi dan Sjafruddin banyak memberikan gambaran ideologi dan kebijakan Masyumi.
2. Peran serta Sjafruddin bagi Indonesia tahun 1945-1949 yaitu diawali dengan dipilihnya Sjafruddin menjadi salah satu anggota Badan Pekerja KNIP pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945.
3. Peran penting Sjafruddin selanjutnya yaitu menjadi Menteri Keuangan Kabinet Sjahrir III dengan kebijakan mengeluarkan Uang Republik Indonesia (ORI). Peristiwa dikeluarkannya ORI merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan ekonomi Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan dan sedang membebaskan diri dari kolonialisme ekonomi, sebagai alat perjuangan kemerdekaan dalam membiayai berbagai macam keperluan negara.
4. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran memperbaiki ekonomi Indonesia. Sjafruddin ditunjuk untuk membentuk PDRI pada tahun 1948 guna menyelamatkan Republik dengan menjamin kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, memenuhi tuntutan hukum internasional, dan untuk melanjutkan perjuangan.

5. Sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Hatta tahun 1949, Sjafruddin mengeluarkan kebijakan penting yaitu “Operasi Gunting Sjafruddin” yang berhasil menembak beberapa sasaran yaitu pengganti uang yang bermacam-macam itu dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dengan demikian menurunkan harga barang, mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib. Pada tahun 1951 Sjafruddin Prawiranegara terpilih menjadi *Gubernur De Javasche Bank*, dan pada 1953 Sjafruddin menjadi Gubernur Pertama Bank Indonesia.

6.2 Saran

Ada beberapa saran yang akan penulis berikan kepada para pembaca, di antaranya :

- 1) Kepada para Mahasiswa calon guru sejarah, Penelitian ini diharapkan dapat mengasah dan memahami secara mendalam mengenai Peranan Sjafruddin Prawiranegara bagi Bangsa Indonesia tahun 1946-1949.
- 2) Kepada almamater, hendaknya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengadakan penelitian, terutama yang berada di wilayah sendiri, sehingga akan membawa dampak terhadap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara.
- 3) Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Peranan Sjafruddin Prawiranegara bagi Bangsa Indonesia tahun 1946-1949, dan dapat mengambil nilia-nilai tauladan dan rasa nasionalisme yang dicontohkan dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, baik dalam hal politik, hambatan, perjuangan, dan kepemimpinannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aning, F. 2005. *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia*. Jakarta: Narasi.
- Bruce J. Cohen. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*, terjemahan oleh Sahat Simamora. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Budiawati, Y. 2014. *Konsep Pembangunan Perekonomian Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafruddin Prawiranegara*. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah.
- Duverger, M. 1972. *Sosiologi Politik*. Terjemahan oleh Daniel Dhakidae. 1993. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah: Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Hakim, L., dan Noer, M. 2011. *Mr. Syafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah*. Jakarta: Harian Republika.
- Hatta, M. 2011. *Untuk Negeriku : Sebuah Otobiografi*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Imran., Djamhari., dan Chaniago. 2003. *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta. Citra Pendidikan.
- Kahin, A. 1989. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kahin, A. 2008. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maeswara, G. 2010. *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950: Perjuangan Bersenjata dan Diplomasi untuk Mempertahankan Kemerdekaan*. Yogyakarta: Narasi.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad Ke-20 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pamudji. 1983. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara

- Permana, R. 2013. *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI): Suatu Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948-1949*. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UNEJ.
- Poesponegoro, M., dan Notosusanto, N. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasjid, S. M. 1984. *Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bulan Bintang.
- Reading, H. F. 1986. *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*. Terjemahan oleh Sahat Simamora. 1986. Jakarta: CV Rajawali.
- Rosidi, A. 1986. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Cetakan Pertama. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sriyanto. 2011. *Pemikiran Dakwah Mr. Sjafruddin Prawiranegara*. Tidak Diterbitkan. *Tesis*. Surakarta. Program Studi Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

LAMPIRAN. Matriks Penelitian

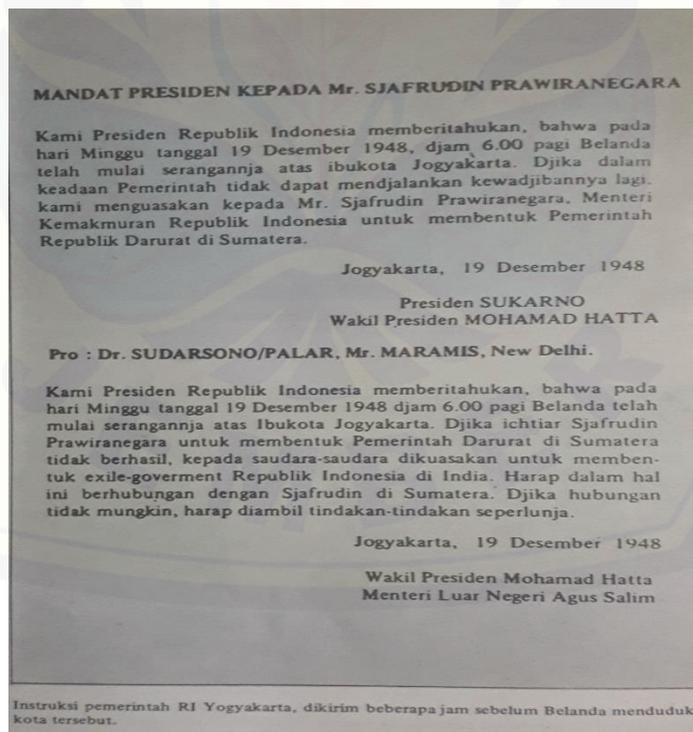
Tema Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Sifat Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
Sejarah Nasional Indonesia	Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949	Penelitian Sejarah	Metode Penelitian Sejarah dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi	Kajian Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai BP KNIP tahun 1945? 2. bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan tahun 1946-1947? 3. bagaimana peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri kemakmuran tahun 1948-1949? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku 2. Skripsi 3. Jurnal 4. Artikel 5. Internet

LAMPIRAN B. PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA

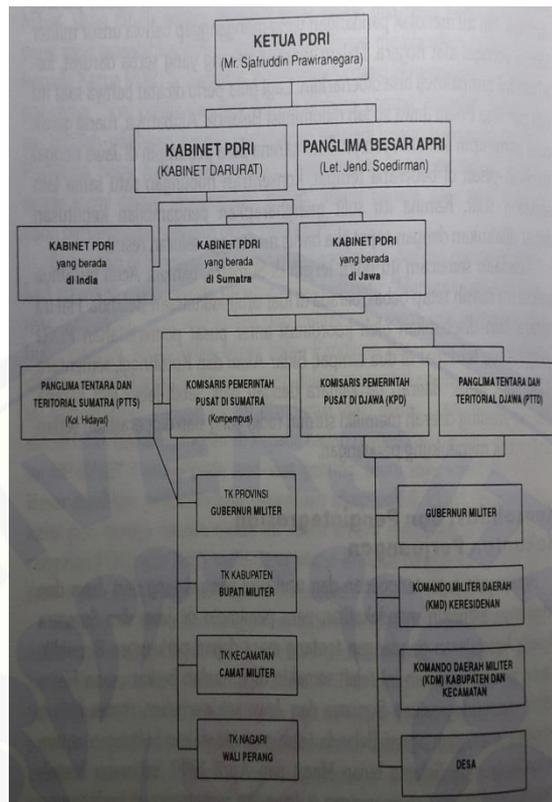


Penahanan tokoh-tokoh Republik, Yogyakarta, 19 Desember, 1948
(dari kiri: Sjahrir, perwira Belanda, Sukarno, Hatta)

Sumber : Kahin (2008: 212)



Sumber : Rosidi (1986:291)



Struktur Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Sumber : Zed (1997:204-205)